

# Fenomena Papua

ESAI-ESAI SOSIAL

**Undang-undang Republik Indonesia  
Nomor 28 Tahun 2 tentang Hak Cipta**

**Lingkup Hak Cipta**

**Pasal 1**

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

# Fenomena Papua

ESAI-ESAI SOSIAL

Alexandro F. Ranga OFM

Jayapura:  
Sekretariat Keadilan, Perdamaian,  
dan Keutuhan Ciptaan Fransiskan Papua

Fenomena Papua:  
Esai-esai Sosial  
© Alexandro F. Rangga OFM

Cetakan Pertama, April 2018

Penyunting  
Basilius Triharyanto

Perancang Sampul & Penata Letak  
Anastasia Lintang

SKPKC Fransiskan Papua  
Jl. Kemiri Kompleks Misi Katolik,  
Biara St. Antonius Sentani,  
Jayapura, Papua  
[www.fransiskanpapua.org](http://www.fransiskanpapua.org)  
Email : [skpkc2010@gmail.com](mailto:skpkc2010@gmail.com)

Rangga, Alexandro F. OFM ; Penyunting, Basilius Triharyanto  
Fenomena Papua: Esai-esai Sosial  
Jayapura: SKPKC Fransiskan Papua, 2018  
xxiv + 105; 13 cm x 20 cm  
ISBN 978-602-74463-3-5

Teruntuk  
Orang-orang Papua yang menderita dan berjuang demi  
kemanusiaan



*Kulihat bayang itu  
Semakin kukejar semakin jauh  
cahaya benderang, bayang menghilang  
kulihat bayang itu  
mengejarku dalam diam  
searah gerak tubuh, bayang menguntit  
bayang itu,  
bayangan gelap  
pada tanah Islade Oro*

**“BAYANG-BAYANG”**

*Biara Sang Surya, awal Mei '10*



# Daftar Isi

Kata Pengantar — iii

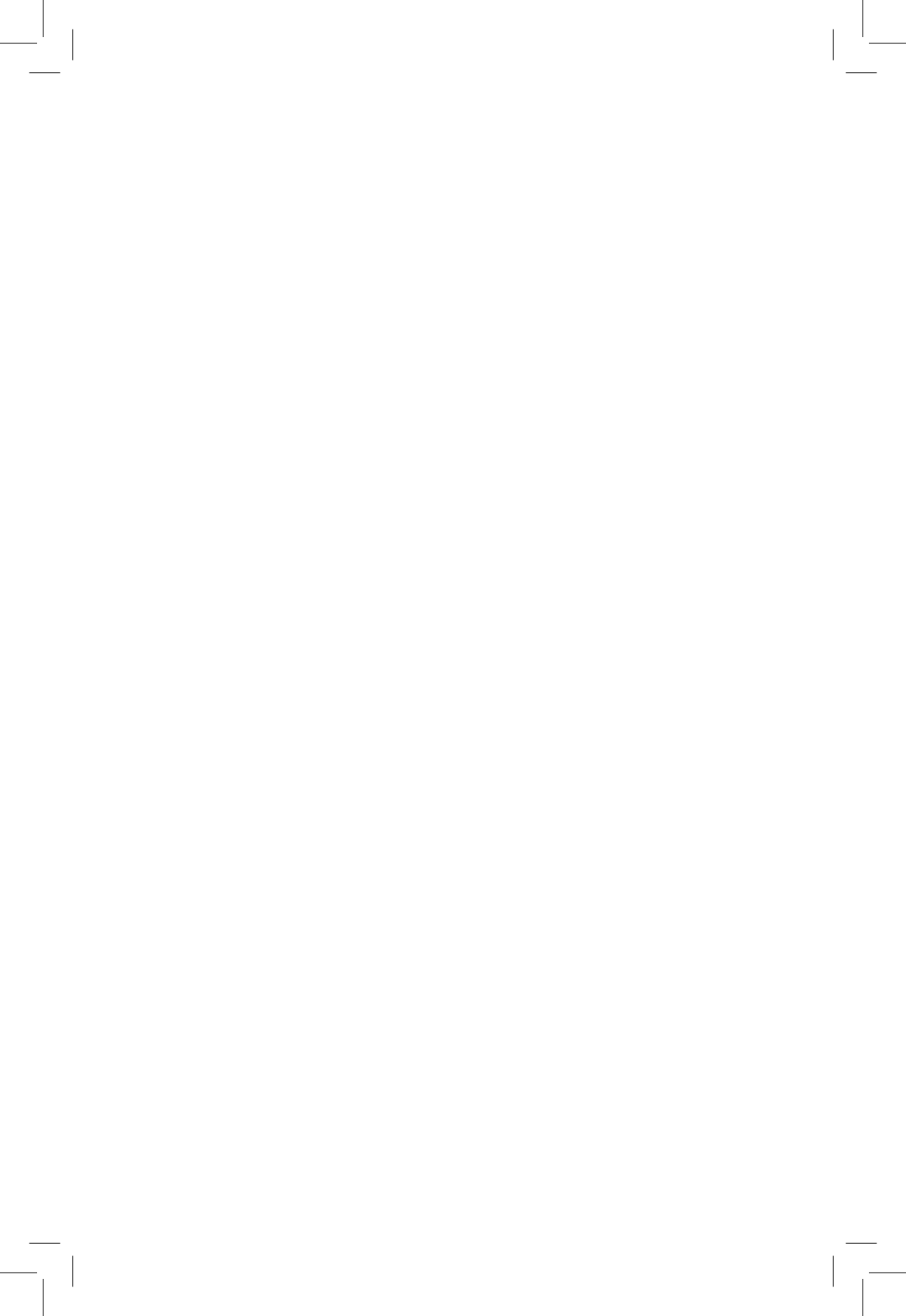
Prakata Penulis — v

Prolog — ix

1. Mengapa *Ko* Jual Bumi Papua? — 1
2. Memulihkan Luka-luka Pembangunan — 9
3. Fenomena Otonomi Khusus — 15
4. Tragedi Asmat — 25
5. HIV-AIDS: yang Mematikan dan Terlupakan — 33
6. Durkheim, Weber, dan Miras — 41
7. Stigma Pemabuk — 51
8. *Ko* Kerja *Ko* Ada — 59
9. Wajah Buruk Pendidikan — 67
10. Papua dan Kekuasaan — 79
11. Turisme dan Kearifan Ekologis — 87
12. Miskin di Tanah Kaya — 95

Epilog — 101

Daftar Pustaka — 105



# Kata Pengantar

*Tanah Papua*, sebuah lagu yang ditenarkan oleh Trio Ambisi; melukiskan Tanah Papua sebagai pulau yang indah, kaya akan alam: hutan, laut, margasatwa dan tambang. Di atas pulau inilah tempat manusia kriting rambut hitam kulit hidup dan berkembang. Indah dan kayanya alam tempat mereka berdiam, berbanding terbalik dengan kenyataan hidup sosial mereka sehari-hari. Bukan saja rambut yang kriting, ‘talingkar’ dan gelapnya kulit yang hitam tapi memang mereka sendiri hidup dalam lilitan berbagai konflik sosial yang tak berujung sejak menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan terus menerus rindu keluar dari lorong gelap persoalan hidup itu.

Di dalam buku ini, secara gamblang dan dengan bahasa yang sederhana, mudah dimengerti, Alexandro Rangga melukiskan situasi sosial yang dialami Orang Asli Papua (OAP). Para pendatang cenderung memberi stigma negatif terhadap OAP. Macam-macam stigma negatif diberikan,

seperti: pemalas, pemabuk, pemberontak, bodoh, miskin, dan lain sebagainya tapi jarang bertanya: mengapa mereka begitu dan berperilaku seperti itu.

Buku kecil ini menuntun para pembacanya untuk melihat secara lebih luas, mencari lebih jauh dan dalam mengapa saudaranya yang *kriting rambut dan hitam kulit* itu begitu dan bersikap seperti itu. Di mana letak soal? Pada mereka? Pada para pendatang? Pada kebijakan pemerintah? Kalau jawabannya TIDAK. Lalu letak soalnya pada apa atau siapa ?

Pokok-pokok yang diangkat dalam buku ini, diuraikan dengan singkat, akan mengantar Anda kepada kesadaran untuk melihat secara utuh menyeluruh gurita persoalan di Papua.

Buku ini semacam buku panduan, buku saku yang boleh dibawa ke mana pun Anda pergi berkeliling dari tempat ke tempat di Papua.

Setiap kali Anda membukanya saat berjumpa dengan saudara-saudarimu yang *kriting rambut hitam kulit* itu; engkau akan lebih mengerti, lebih memahami mengapa mereka begitu. Bukankah lebih baik memahami daripada dipahami?

Selamat membaca.

RP Gabriel Ngga OFM  
Provinsial Provinsi  
Santo Fransiskus Duta Damai

# Prakata Penulis

*We have the power to be life-destroyers or life-givers with  
just the words we speak.*  
**Steve and Lois Rabey**

Steve and Lois Rabey, dalam bukunya *101 Most Powerful Verses In The Bible*, mengingatkan kita betapa kata-kata yang kita pakai mempunyai kekuatan untuk menjadi penghancur atau sebaliknya penyokong kehidupan. Kata-kata negatif yang diungkapkan secara sembrono sungguh merusak orang lain. Sebaliknya kata-kata bernada positif yang diungkapkan secara bijaksana dapat memotivasi orang lain untuk menjadi pribadi yang lebih baik.

Sudah hampir sebelas tahun saya berada di Papua; di Wamena, Sentani, Abepura, Jayapura, Timika, Merauke dan Agats. Saya berjumpa dengan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam Papua, yang tidak hanya unik tapi juga inspiratif. Perjumpaan itu mengantar saya pada pengenalan akan diri yang lebih baik serentak pemahaman yang lebih benderang tentang Papua. Pengenalan diri ini membantu saya untuk terlibat dengan segala kompleksitas hidup manusia Papua. Sementara itu, pemahaman yang

lebih benderang membantu saya untuk melihat fenomena hidup manusia Papua secara lebih utuh dan menyeluruh.

Pemahaman yang utuh dan menyeluruh akan hidup manusia Papua amatlah penting. Jika tidak, kita akan terjebak pada cara pandang yang sempit, cenderung melihat dan menghakimi dari jauh yang berujung pada stigmatisasi terhadap orang Papua. Stigmatisasi inilah yang hendak saya *lawan* lewat tulisan-tulisan dalam buku ini. Tujuan *perlawanan* ini bukan pertama-tama untuk mengingkari stigma-stigma terhadap orang Papua tetapi menempatkan stigma-stigma tersebut secara pas dan proporsional sekaligus membakar semangat orang Papua untuk keluar dari tempurung rendah diri. Ujung-ujungnya ada suara orang Papua yang berteriak lantang: *tong juga BISA!!*

Dalam kaitannya dengan itu, Program Nawacita sebagai sembilan agenda pokok pasangan Jokowi-Kalla yang sekaligus menjadi visi-misi keduanya sebagai presiden dan wakil presiden, khususnya agenda kedelapan, Revolusi Mental, amatlah menarik. Bagi kami, Revolusi Mental amatlah diperlukan dalam konteks Papua sebagai usaha pembangunan karakter orang Papua untuk mempertegas kepribadian dan jati dirinya. Dengan kesadaran akan diri dan potensinya serta kebanggaan sebagai Manusia Papua, kami percaya bahwa orang Papua dapat bersaing dalam segala bidang kehidupan terutama dengan kaum migran dan urban yang datang dari berbagai latar belakang suku dan budaya. Bentuk konkret Revolusi Mental ini ialah pada perbaikan sistem pendidikan di Papua dengan tingkat akses pada pendidikan yang tinggi bagi masyarakat

hingga ke pelosok. Dengan akses dan karenanya mendapat pendidikan yang berkualitas, Sumber Daya Manusia Papua pun makin modern sehingga tidak hanya gaya hidupnya yang modern tetapi juga mentalitas, cara berpikir serta cara bertindak yang modern.

Sejumlah tulisan dalam buku ini merupakan pengolahan lebih lanjut dari tulisan-tulisan saya yang pernah dimuat di beberapa majalah, baik yang bersifat ilmiah populer maupun tulisan lepas serta beberapa tulisan tambahan yang ditulis seiring pergumulan saya selama berada di Tanah Papua ini. . Pergumulan ini sekaligus menjadi hadiah yang bisa saya berikan kepada tanah ini yang telah mengasuh dan menyusui saya selama kurang lebih sebelas tahun sekaligus hadiah tahbisan imamatku bagi semua orang yang dengan caranya masing-masing telah mendukung hidup dan panggilanku.

Akhirnya saya menghaturkan syukur kepada Tuhan Allah yang telah menuntun saya ke tanah yang indah ini sekaligus mengetuk hati saya untuk menulis buku ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada segenap makhluk yang hidup di atas tanah Papua ini yang dengan caranya masing-masing telah mengajarkan saya keindahan alam Papua dan kearifan lokal Manusia Papua: Alm.Robert Jitmau, Yulius Uropmabin, Edi Doga, Franky Yoltmen, Fredy Pawika, Neles Siep, Rudolf Kambayong, Elias Logo, Philip Elosak, dan Felix Kalakmabin.

Secara khusus saya berterima kasih kepada persaudaraan Fransiskan Papua, kepada Kakak Yuliana Langowuyo yang menjadi penghubung ke mana-mana, serta kepada RP Gabriel Ngga OFM, Provinsi Provinsi

Santo Fransiskus Duta Damai yang telah menulis Kata Pengantar untuk buku ini, Direktur SKPKC Fransiskan Papua Wilhelmus I.G. Saur OFM, dan Staf SKPKC FP: Bernard Koten, Maria, Aventinus Jenaru OFM.

Tidak lupa pula saya menghaturkan terima kasih yang mendalam kepada Bung Basil Triharyanto yang telah menyunting buku ini serta para donatur yang tidak ingin disebutkan namanya, yang berkenan mendanai penerbitan buku ini. Semoga buku ini bermanfaat bagi usaha untuk menghormati dan menghargai harkat dan martabat alam-manusia Papua. Dormom

Agats, Asmat, 12 April 2018  
Alexandro F. Rangga OFM

# Prolog

ADAKAH yang salah dengan keriting rambut dan hitam kulit? Jika ya, mengapa Tuhan menciptakan kami demikian, hanya supaya kami dihina, dianggap bodoh, miskin, terbelakang dan primitif? Manu Alua, seorang Fransiskan, mengungkapkan saat menyaksikan penghinaan dan perlakuan tidak manusiawi orang-orang Papua pada Kongres Rakyat Papua III tahun 2011 silam.

Dengan hati pedih penuh penyesalan, rangkaian kalimat tersebut keluar dari mulutnya. Manu Alua tak sendirian, perasaan dan pergumulannya juga tumbuh subur di kalangan orang-orang Papua.

•••

Senja itu, 19 Oktober 2011, Lapangan Zakheus, Jayapura. Suatu aksi represif dan kekerasan pecah di tengah Kongres Rakyat Papua III. Di atas luka pukulan, tendangan, oleh popor senjata aparat polisi dan militer, luka yang membekas adalah perlakuan dan tindakan diskriminasi rasialis ketika itu, baik dengan kata-kata maupun perbuatan. Martabat orang Papua kala itu direndahkan serendah-rendahnya.

Saat itu, orang Papua hendak menggunakan kebebasannya untuk berpikir dan menyatakan pendapatnya, berkumpul dan berasosiasi secara damai. Jika dengan cara

damai pun, mereka ditembak, sampai kapan terwujud Tanah Papua yang damai?

Selain kekerasan, yang terjadi di Lapangan Zakheus, merupakan tindakan diskriminasi rasial kepada orang-orang Papua.

Diskriminasi rasial merupakan suatu pembedaan, pengucilan, pembatasan atau pilihan berdasarkan ras, warna kulit, keturunan atau asal usul etnik atau kebangsaan, yang bertujuan atau berakibat mencabut atau mengurangi pengakuan, perolehan atau pelaksanaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan mendasar, dalam suatu kesederajatan, di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya atau bidang-bidang kehidupan kemasyarakatan lainnya.

Sejak 4 Januari 1949, perlakuan diskriminasi telah dikecam dunia internasional, termasuk negara Indonesia. Melalui Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, segala bangsa itu mendorong penghormatan dan pematuhan hak-hak asasi manusia dan kebebasan mendasar bagi semua tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama.

Namun, untuk kesekian kalinya, kisah pedih di Lapangan Zakheus itu, membuktikan betapa negara lalai melindungi warganya terhadap tindakan kekerasan ataupun melukai secara badaniah yang dilakukan oleh aparat pemerintah (aparat keamanan).

Negara hendaknya tidak lupa bahwa sikap diskriminasi dapat menjadi *boomerang*. Fredrik Barth dan Eric Wolf pernah mengingatkan bahwa perasaan sebagai kelompok tertentu (etnis) merupakan hasil interaksi dan bukan merupakan sifat-sifat hakiki sebuah kelompok.

Lewat tindakan diskriminasi negara secara jujur mengakui adanya *perbedaan* sekaligus ciri khas Papua. Lewat tindakan diskriminasi, identitas etnik sebagai *Papua* akan semakin diperkuat.

Orang Papua dengan identitas etnik sebagai ras Melanesia telah dijadikan alat politik untuk membelenggu dan membungkam kebebasan dan perjuangan penegakkan hak asasi manusia. Diskriminasi rasial dilakukan agar orang tak mengekspekasikan sikapnya dengan mengibarkan bendera Bintang Kejora, atau seruan menentukan nasibnya sendiri.

•••

Seorang teman, dalam penelitian doktoralnya di Papua mengajukan satu pertanyaan menarik kepada para respondennya yang semuanya orang asli Papua dari Sorong sampai Merauke. Mengapa mau merdeka? Jawaban yang diperolehnya pun amat menarik. Orang asli Papua ingin merdeka bukan karena persoalan hak asasi manusia (dalam bidang sipil dan politik, ekonomi, sosial dan budaya) yang berlarut-larut dan berulang. Tetapi terutama karena “Kami orang asli Papua bukan Indonesia (atau Melayu), kami Melanesia”.

Pada kesempatan lain, saya berjumpa dengan dua orang turis asal Negeri Basque di tempat wisata Ifar Gunung Sentani. Saya mengajukan pertanyaan yang sama kepada keduanya. Mengapa kalian ingin merdeka dan memisahkan diri dari Spanyol? “Karena kami bukan orang Spanyol, kami Basque,” kata mereka.

“Perjuangan kami hampir selesai, tiga perempat parlemen sudah setuju. Kami berjuang lewat semua bidang. Itu sebabnya Barcelona pun jadi ikon perjuangan kemerdekaan dengan slogan *mes que un club*,” katanya, lagi.

Memang belum semua orang Papua sehati dan sependapat tentang Papua Merdeka, namun kita bisa melihat bagaimana pemain sepak bola Persipura yang membela tim nasional sering tidak terlihat membuka mulutnya saat mengumandangkan lagu Indonesia Raya.

Dengan demikian, kita semua lalu dibuat bingung dan tak mengerti, dengan rentetan tembakan, hinaan, pukulan, tendangan dan semprotan gas air mata pada saat Kongres Rakyat Papua III. Negara telah lupa hadir melindungi hak-hak orang Papua sebagai warga negara yang mestinya dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi rasial.

Setelah begitu banyak pelanggaran hak asasi manusia di Tanah Papua sejak integrasi dengan Indonesia, orang Papua harus menghadapi perlakuan diskriminatif, diberikan stigma sebagai pemabuk, bodoh, primitif, dan bahkan nyawa terancam karena dicap separatis, hingga saat ini.

Tak hanya menjadi korban senjata, tetapi masih sekian banyak orang Papua yang tidak mendapat akses pelayanan publik dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan sebagainya, yang menjadi hak-hak dasar bagi setiap manusia.

Adakah yang salah dengan orang Papua yang berkulit hitam dan rambut keriting?

---

Setelah begitu banyak pelanggaran hak asasi manusia di Tanah Papua sejak integrasi dengan Indonesia, orang Papua harus menghadapi perlakuan diskriminatif, diberikan stigma sebagai pemabuk, bodoh, primitif, dan bahkan nyawa terancam karena dicap separatis, hingga saat ini.



— I

# Mengapa *Ko* Jual Bumi Papua?

*“Ondo, kenapa ko jual tanah?  
Sekarang sa tra bisa pasang jerat lagi  
Cari tikus tanah sudah susah”*

PENGGALAN kalimat itu dari cerita pendek berjudul “Jangan Kasih Masuk Tukang Sensor Dong” karya Lenny Bonggoro, siswi SMP YPPK Taruna Tegasa Arso kota, Kabupaten Keerom, Papua, yang ditulis untuk memperingati hari Lingkungan Hidup Sedunia pada 5 Juni 2012

Lenny mengungkapkan jeritan hatinya, yang juga dirasakan oleh teman-temannya di Arso, yang memaknai bumi adalah mama. Bumi yang menghidupi manusia Papua, sumber kehidupan makanan; sagu, babi hutan,

ikan. Maka saat bumi atau tanah dijualbelikan, bumi seperti rahim seorang mama yang melahirkan kehidupan telah mengalami kerusakan dan membawa bencana bagi kehidupan orang-orang Papua.

•••

### **Konsep tentang Bumi**

Menurut Kluckhohn dan Stodbeck (1961), konsep yang berbeda turut mempengaruhi sikap kita setiap hari. Konsep yang berbeda itu menyangkut lima prinsip dasar yakni hakekat hidup, karya manusia, waktu, sesama manusia, dan alam. Saya membatasi diri pada konsep yang berbeda tentang alam (baca: bumi). Ada yang memandang bumi sebagai dewa atau dewi, yang suci, agung, dan sakral. Ada yang memandangnya sebagai objek, yang dikeruk dan dieskloitasi. Ada yang memandangnya sebagai ciptaan, yang setara, sederajat dan sehakekat dengan manusia.

Pandangan pertama, bumi sebagai dewa-dewi, yang suci dan sakral dapat ditarik garisnya hingga ke mitologi Yunani tentang Gaia, Dewi Yunani kuno sebagai Ibu semesta, para dewa, para raksasa – pencipta dan pemberi kehidupan. Secara historis, dewi dikaitkan dengan kesuburan. Dalam praktek keagamaan suku Inca, Babilonia, Romawi, Yunani atau pun India, imam perempuan memainkan peranan penting. Di Indonesia, dalam mitologi Sunda dikenal Dewi Sri atau Dewi Padi yang berkuasa atas kelahiran dan kehidupan, serta kesuburan padi.

Secara sederhana pandangan akan alam sebagai

yang suci dan sakral bertolak dari adanya relasi yang erat antara manusia dengan alam. Relasi yang erat ini lahir dari pengalaman-pengalaman mistik-religius akan tempat-tempat tertentu yang dinilai sakral dan keramat seperti hutan-hutan, pohon-pohon, kali, danau, laut atau gunung tertentu. Sebagai contoh, suku Kamoro sangat menghormati bumi sebagai yang suci karena memandang bumi, pohon, binatang dan bahkan benda-benda mempunyai jiwa (Coenen, 2012).

Pandangan kedua, bumi sebagai objek, yang dikeruk dan dieksploitasi dapat ditarik garisnya hingga ke tradisi Yudeo-Kristiani sebagai salah tafsir atas kisah penciptaan dalam Kitab Kejadian Pasal 1 ayat 28. Salah tafsir tersebut terutama pada kata “taklukkanlah” yang seharusnya dibaca “mengolah atau memelihara” (bdk. Kej 2:15). Menurut Lynn White, Jr. dalam papernya *The Historical Roots of Our Ecological Crisis* (1964), lewat tradisi ini, kekristenan justru telah mengajarkan hal yang berlawanan dengan mitos-mitos yang memandang alam sebagai yang suci dan sakral dan karenanya harus diperlakukan dengan hormat. Baginya, kekristenanlah biang kerok kerusakan ekologi. Tidaklah mengherankan jika ia mengatakan bahwa; “*what we do about ecology depends on our ideas of the man - nature relationship. More science and more technology are not going to get us out of the present ecologic crisis until we find a new religion, or rethink our old one.*” Namun rupanya Hardiansyah Suteja (2009) tidak berhenti sampai di situ. Dalam papernya Rekonstruksi Agama dan Ekologi, sambil mengingatkan bahwa selain kekristenan, Lynn juga menyebut faktor sains dan teknologi sebagai penyumbang kerusakan ekologi, ia

juga menekankan bahwa relasi agama dan ekologi tidaklah lengkap tanpa berbicara tentang peradaban, ekonomi dan politik. Dengan ini, sikap kritis mesti dibangun tidak hanya atas konsep atau dogma agama tapi juga tingkat peradaban, kepentingan ekonomi, persoalan politik serta perkembangan sains dan teknologi.

Pandangan ketiga, bumi sebagai subjek yang setara, sederajat dan sehakikat dengan manusia. Dengan mengacu pada kedua pandangan di atas, kita dapat mulai lagi dari Lynn White, Jr. sambil memperhatikan hipotesis Gaia dari James Lovelock (1972). Di tengah kritik pedasnya terhadap kekristenan, Lynn White, Jr. mengemukakan pandangan kekristenan alternatif yang lebih ekologis yakni alam sebagai saudara dan saudari dengan membaptis St. Fransiskus Asisi sebagai patron Santo Pelindung Ekologi. Baginya Fransiskus Asisi telah menempatkan kembali manusia pada kesadaran sebagai makhluk ciptaan Allah. Sebagai ciptaan, manusia berada pada puncak piramida penciptaan. Ia akan hancur dan berantakkan tanpa dasar piramida yakni ciptaan lainnya. Sementara Lovelock mengemukakan Hipotesis Gaia, bukan sekedar mengikuti saran William Golding, novelis yang juga teman sekampungnya dari Bovechalke-Wiltshire, tetapi karena kata Gaia yang berakar pada mitologi Yunani tentang Gaia, Dewi Yunani Kuno – pencipta dan pemberi kehidupan – mewakili pendapatnya akan bumi sebagai suatu sistem kompleks yang mengatur dirinya sendiri. Oleh karena itu, setiap organisme yang ada di bumi, terutama manusia sebagai penyumbang terbesar kerusakan bumi, mesti menjaga stabilitas lingkungan agar kehidupan tetap eksis.

•••

BERTOLAK dari ketiga pandangan di atas jual beli bumi-manusia, tidak dapat dipisahkan dari aspek sipil politik (SIPOL) dan ekonomi, sosial, budaya (EKOSOB) baik pada tataran lokal, nasional, dan internasional. Misalnya, dengan semangat *feed Indonesia, feed the world*, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, meresmikan MIFEE (Merauke Integrated Food and Energy Estate) pada tahun 2010 di Merauke. Ada dua indikasi yang muncul. Pertama, bahwa fenomena *land-grabbing* yang berkembang di seantero nusantara adalah “rayuan beramplop” dari korporasi kepada pemerintah dan “rayuan bersenjata” dari pemerintah kepada masyarakat pemilik hak ulayat. Kedua, meskipun bertajuk *food and energy estate*, kepentingan ekonomilah yang dikejar, tampak dari pengelolaan lahan untuk tanaman industri karet (970.000 ha), kelapa sawit (300.000 ha) dan tanaman pangan (69.000 ha). Akibatnya, masyarakat kehilangan tanah atau bumi sebagai mama mereka yang menyediakan makanan dan minuman (Fransiscan International, *Human Rights in Papua 2010/2011*). Cerita yang sama mengalir dari Arso, tempat kelahiran Lenny Bonggoro sejak masuknya investasi sawit tahun 2010 seluas 18.337 hektare (SKPKC Fransiskan Papua, 2011).

Kasus pembalakan liar (*illegal logging*), misalnya. Menurut John Wing dan Peter King (2005) mengungkap bahwa sebagian besar praktik illegal logging di sejumlah wilayah seperti di Sorong, Manokwari, Bintuni, Fak-Fak, dan Jayapura dilindungi oleh Pemerintah dan *diback-up*

oleh aparat keamanan. Pelaku *illegang logging* dalam skala besar dilakukan oleh perusahaan dari Malaysia, Korea, dan China, yang melahirkan konflik antar suku pemilik tanah ulayat.

Lalu kasus pertambangan yang berakibat negatif dan membawa orang-orang Papua menjadi korban. Pertambangan emas PT Freeport misalnya, Pemerintah Indonesia tampak 'tak berdaya' di hadapan korporasi besar itu, malah menutup-nutupi kerusakan bumi akibat limbah Freeport dengan dukungan militer dan sebagainya. Keterlibatan aparat keamanan juga bisa dilihat dalam kasus pertambangan liar di Degeuwo, Kabupaten Paniai. Sejak dibuka tahun 2006 hingga kini, kegiatan tambang tetap berjalan. Berbagai usaha advokasi mentok. Salah satu penyebab ialah adanya dukungan polisi. Menurut John Gobay (2013) dalam buku *Dari PETI Menuju WPR*, aparat keamanan menerima pemberian berupa komisi yang diberikan oleh pengusaha tambang, minuman keras, dan tempat hiburan. Praktik-praktik usaha itu membawa dampak negatif bagi masyarakat seperti menyebarkan virus HIV-AIDS dari prostitusi, mentalitas buruk masyarakat akibat mengonsumsi miras, dan hilangnya sumber-sumber air karena sungai-sungainya tercemar limbah tambang, bahkan berakibat ribuan hektar hutan mati.

Ketiga fenomena di atas diangkat untuk menunjukkan bahwa jual beli bumi juga selalu berarti jual beli manusia. Ketika Ibu Bumi diperjualbelikan, pada saat yang sama manusia yang berpijak di atasnya menjadi komoditi ekonomi; lokal, nasional dan internasional. Pada akhirnya manusia Papua tidak hanya kehilangan sang ibu tetapi

juga kehilangan hak hidup, bahkan hilangnya masa depan generasi sekarang dan akan datang.

•••

Bumi adalah ibu kita, yang melahirkan dan menciptakan kehidupan di Tanah Papua, juga sesungguhnya bagi tanah-tanah lain dimana kita tinggal. Bumi adalah rumah kita. Maka, orang yang hilang nalar akal sehat dan mempunyai nurani tumpul yang tega menjual tanah, bumi, ibu kita sendiri, untuk dieksploitasi dan dirusak. Ia mengorbankan dan memusnahkan anak dan cucu, generasi masa depan Papua.

---

*Ketika Ibu Bumi  
diperjualbelikan, pada saat yang  
sama manusia yang berpijak  
di atasnya menjadi komoditi  
ekonomi; lokal, nasional dan  
international. Pada akhirnya  
manusia Papua tidak hanya  
kehilangan sang ibu tetapi juga  
kehilangan hak hidup, bahkan  
hilangnya masa depan generasi  
sekarang dan akan datang.*

## — 2

# Memulihkan Luka-luka Pembangunan

*“We can neither heal nor build if such healing and building are perceived as one-way processes, with the victims of the past injustices forgiving ...if we have people who continue with blind arrogance to practice racism...if we continue with business as usual, wallowing in notions of the past”*

**(Nelson Mandela, 9 Februari 1996)**

Luka pembangunan, maksudnya, luka akibat proyek pembangunan yang dialami oleh orang-orang yang tergusur dan korban ketidakadilan. Di Papua, tidak sedikit proyek pembangunan mengorbankan penduduk-penduduk yang tinggal dan memiliki tanah.

Proyek raksasa MIFEE (Merauke Integrated Food and Energy State) di Merauke, daerah Papua bagian selatan, misalnya, memakan korban orang-orang suku-suku pemilik tanah ulayat. Mereka terusir, tergusur, dan hidup

tak tentu karena tanahnya dikuasai oleh perusahaan, serta mengakibatkan rusaknya kebudayaan leluhur mereka. Bahkan, nyawanya terancam saat membela dan mempertahankan tanah dan budayanya. Inilah luka dan derita, memoria passionis, akibat pembangunan di Tanah Papua.

•••

Pada 2010 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendeklarasikan proyek raksasa pertanian di kawasan Merauke, Papua. Kala itu masyarakat menentang proyek itu karena akan menggerus tanah-tanah masyarakat atau tanah ulayat. Lebih dari satu juta hektar lahan dipakai untuk pelaksanaan proyek pangan dan energi tersebut.

Pengembangan lahan pertanian dan energi nabati itu dilakukan bertahap. Tahap pertama atau jangka pendek, 2010 hingga 2014, luas lahan untuk proyek tersebut luasnya mencapai 423 ribu hektar lebih. Selanjutnya, jangka menengah, 2015 hingga 2019, luas lahan bertambah sekitar 632 ribu hektar, dan jangka panjang, periode akhir tahun 2020-2030, lahan yang digunakan bertambah luasnya 227 ribu hektar lebih.

Proyek ambisius Pemerintah di era Susilo Bambang Yudhoyono ini merupakan proyek agropolitan, agroindustri, dan agrowisata. Proyek ini melibatkan perusahaan-perusahaan nasional dan multinasional, yang jumlahnya hingga saat ini sekitar 36 perusahaan besar.

Bagaimana pelaksanaan MIFEE di Merauke? Dalam dokumentasi dan sejumlah laporan yang diterbitkan

oleh AwasMIFEE, sebuah lembaga konsorsium individu, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan berbagai pihak yang peduli dengan lingkungan dan alam, mengungkapkan adanya persoalan pengambilalihan lahan atau tanah masyarakat secara paksa dalam pembukaan lahan MIFEE.

Klaim-klaim penguasaan tanah atau lahan MIFEE yang dilakukan perusahaan tanpa melalui proses yang terbuka dan melibatkan masyarakat setempat, terutama pemilik hak ulayat. Masyarakat juga tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan mengenai penggunaan, pengelolaan, dan penataan kawasan.

Tak sedikit ritus-ritus adat yang dihormati telah rusak atau pun digusur tanpa melalui ritual adat leluhur. Tanah-tanah ulayat dikuasai secara paksa dan tidak memberikan kompensasi atau pembelian lahan yang murah. Masyarakat yang menolak menjual tanahnya menghadapi aparat keamanan yang disewa oleh perusahaan.

Konflik lahan pertanian atau agraria terjadi, baik antar masyarakat dengan perusahaan yang didukung oleh aparat keamanan, atau antar pemilik tanah ulayat. Masuknya perusahaan yang membeli atau menguasai tanah-tanah mereka, tak jarang yang merusak kesepakatan bersama para pemilik hak ulayat. Perusahaan mempengaruhi diantara para pemilik tanah ulayat yang bersatu untuk mempertahankan tanah mereka. Upaya perusahaan itu mampu menggerogoti komitmen bersama antar pemilik hak ulayat, tentang status kepemilikan tanah ulayat, yang bisa diperjualbelikan kepada perusahaan.

Perampasan lahan ini mengancam hutan-hutan dan desa atau perkampungan-perkampungan yang jauh dari

akses informasi, dimana mereka tidak terpantau dan rentan dari praktik-praktik penguasaan lahan yang merugikan keberadaan mereka.

Selain konflik yang mengakibatkan luka-luka dan penderitaan, kemiskinan adalah ancaman besar bagi penduduk setempat. Saat proyek beroperasi, perusahaan menyerap tenaga-tenaga kerja penduduk setempat dengan upah dan posisi sangat rendah. Sebagian besar warga tidak memiliki keterampilan dan pendidikan yang layak, seperti yang diminta perusahaan.

Kemiskinan terjadi akibat hutan yang mereka miliki telah habis dibabat. Hutan, sebagai sumber pencarian makanan pokok, seperti sagu, sulit mereka dapatkan lagi. Bencana kelaparan dan gizi buruk telah mulai menyerang penduduk suku-suku di kampung Zenegi, Boepe, dan lainnya.

Keluarga-keluarga di wilayah proyek MIFEE mengalami kemiskinan komunal dan turun-temurun. Kehidupan suku-suku di Merauke disatukan dalam komunitas-komunitas bersama, kekerabatan suku dan budaya. Hilangnya hutan adat dan tanah mereka telah menghapus kepemilikan dan kebudayaan yang dihidupi bersama-sama.

•••

Proyek MIFEE, bagi orang Papua, masih dipertanyakan, dan bukan sebuah proyek manusia yang memberikan masa depan yang baik. MIFEE tidak memberikan berkah bagi masyarakat Papua. Bahkan, membawa penduduk Papua dalam kemiskinan, konflik, dan disharmoni antar suku dan komunitas komunalnya.

Bangsa ini mesti belajar dari Presiden Afrika Selatan (1994-1999) dan pejuang revolusioner anti-apartheid, Nelson Mandela yang mengungkapkan bahwa proses pembangunan mempedulikan dan menghormati hak-hak hidup masyarakat. Pembangunan yang didasarkan pada arogansi akan melahirkan masa lalu yang buruk, penuh luka-luka.

Arogansi perusahaan-perusahaan dalam proyek MIFEE terhadap masyarakat sebaiknya segera dihentikan. Karena, aksi-aksi itu telah mengakibatkan luka-luka kepada masyarakat. Sejatinya, pembangunan itu membawa berkah bagi kehidupan penduduk di sekitarnya, dan orang-orang Papua lebih luas. , pembangunan yang memberikan rasa damai, bahkan turut menyembuhkan luka-luka para korban pembangunan.

Penyembuhan terhadap warga yang mengalami luka-luka dan penderitaan hidup sudah waktunya dilakukan. Kekuatan menyembuhkan pengalaman masa lalu, *memoria passionis*, menjadi dasar kuat bagi masyarakat untuk menjadi agen pembangunan. Sebaliknya, bila penyembuhan tidak dilakukan, yang terjadi lahirnya pemberontak dan penghambat pembangunan.

Kita sepatutnya belajar dari Nelson Mandela yang mengajarkan kita tentang penghargaan yang mendalam akan kemanusiaan dan sumber daya manusia. Harga diri orang Papua yang terkoyak amatlah sulit diajak kerja sama sekaligus menjadi agen pembangunan, terlebih-lebih memarginalkan orang Papua dalam investasi. Kini tak bisa lagi menunda-nunda, untuk memberikan kepedulian yang besar pembangunan yang membawa berkah bagi kehidupan masyarakat Papua.

---

Bangsa ini mesti belajar dari Presiden Afrika Selatan (1994-1999) dan pejuang revolusioner anti-apartheid, Nelson Mandela, yang mengungkapkan bahwa proses pembangunan mempedulikan dan menghormati hak-hak hidup masyarakat. Pembangunan yang didasarkan pada arogansi akan melahirkan masa lalu yang buruk, penuh luka-luka.

## — 3

# Fenomena Otonomi Khusus

FENOMENA Otonomi Khusus Papua tak kunjung selesai diperdebatkan, dan menjadi kegelisahan, hingga sempat ditolak oleh ribuan rakyat Papua karena dianggap gagal dilaksanakan.

Otsus Papua menjadi fenomena yang kompleks; dari negosiasi politik dan ekonomi antara rakyat Papua dan Pemerintah Pusat, kebijakan pimpinan daerah, tata kelola dan transparansi keuangan, pelaksanaan pembangunan di daerah, hingga pertanggungjawaban pemimpin daerah kepada rakyat dan Pemerintah di Jakarta.

Esensi lahirnya Otsus Papua kian lepas dari sejarah politik bagaimana negosiasi rakyat Papua dengan Pemerintah, yang kala itu menuntut referendum.

...

Setiap 21 November, Undang-Undang Otonomi Khusus diperingati oleh masyarakat Papua dengan beragam situasi. Satu dekade lalu, masyarakat Papua memperingatinya dalam situasi kekalutan, kemarahan, dan kekecewaan mempertanyakan Otonomi Khusus tak kunjung mengubah Papua secara fundamental. Pemerintah dinilai tidak memberikan komitmen serius dalam melaksanakan Otsus sepenuh hati.

Pemerintah tampaknya lebih kuat mempertahankan status quo atas nama NKRI. Kelemahan-kelemahan Otsus ditutupi dengan menyempitkan persoalan semata-mata keuangan dan manajemen keuangan. Sering kali muncul Otsus dianggap dipakai oleh orang-orang Papua yang menginginkan uang dan jabatan. Saat uang dan jabatan diperoleh, mereka akan diam menyuarakan ketidakberesan dan situasi buruk yang terjadi di Papua. Meski itu terjadi, dimana mereka menjadi 'budak' di negerinya sendiri, namun tidak mewakili rakyat Papua yang menginginkan perubahan menyeluruh.

Status Papua sebagai daerah yang mendapatkan Otonomi Khusus telah menjadi fenomena<sup>1</sup> yang terus diperbincangkan dan tak kunjung selesai. Otsus merupakan peristiwa politik yang membawa arah masa depan Papua.

---

1 Lihat W.J.S.Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia. Fenomena diartikan sebagai hal-hal yang dapat disaksikan dengan pancaindera dan dapat diterangkan dan dinilai secara ilmiah. Selain itu juga menunjuk pada benda, kejadian yang menarik perhatian atau luar biasa sifatnya. Bdk. Paul Edwards (Ed.), *The Encyclopedia of Philosophy*, vol. 5, hal. 139-146. "there are three conditions defening phenomena; 1) Phenomena are essences, 2) Intuited, 3) revealed by bracketing existence. The criterion of completness used earlier was that a definition of "phenomenon" is completed only if it is consisten with the first of the three requirements for phenomenological statements-that they are nonempirical.

Maka, Otsus menjadi fenomena yang membayangi perjalanan Papua dalam beberapa dekade ini. Bahkan hal ini menarik perhatian rakyat Papua, Pemerintah Indonesia hingga dunia<sup>2</sup>.

Magnet Otsus begitu besar karena hemat penulis Otsus lahir sebagai solusi atas masalah-masalah di Tanah Papua yang belum dan tidak tuntas. Bertolak dari kenyataan ini tidaklah keliru jika Otsus dikatakan sebagai solusi yang bermasalah.

Fenomena Otsus, seperti yang diungkapkan Paul Edward diterangkan, “...*that statements about fenomena must be limited to statements about intentional acts.*”<sup>3</sup> Dalam tulisan ini, fenomena Otsus diletakan pada arti “intentional acts” (tindakan yang disengaja) dengan “intentionality” tidak mengacu pada “sesuatu” tetapi pada negara sebagai entitas, dalam hal ini Pemerintah Indonesia.

Maka ada beberapa konteks penting yang diuraikan dalam melihat fenomena Otonomi Khusus Papua, yaitu: 1) Distorsi Sejarah, 2) Pelanggaran Hak Asasi Manusia, 3) Kesenjangan Pembangunan. Ketiga hal inilah yang mendorong lahirnya Otonomi Khusus Papua.

### • Distorsi Sejarah

Penentuan Pendapat Rakyat atau Pepera pada 1969 adalah distorsi paling mendasar bagi rakyat Papua.

---

2 Keprihatinan dunia tampak dari adanya pernyataan ini: “The biggest mistake a person ever made is not only doing something against humanity, but worse for doing nothing for crime against humanity and the nature. Letting things happen is the worst thing we one ever done!” Selengkapnya kunjungi website [www.westpapua.net](http://www.westpapua.net)

3 Paul Edwards (ed.), Ibid.

Pada 5 April 1961, Pemerintah Belanda melantik dan mengukuhkan Dewan Papua Barat bagi tugas-tugas perwakilan serta legislatif. Lantas pada 18 November menetapkan atribut negara Papua yakni lagu kebangsaan Hai Tanahku Papua, bendera Bintang Kejora, Papua Barat sebagai wilayah negara serta dolar New Guinea sebagai mata uang resmi.<sup>4</sup> Artinya, secara de facto Papua telah merdeka. Sementara pengakuan de jure baru akan diberikan pada tahun 1970.

Dalam kurun waktu itulah, distorsi sejarah integrasi Papua ke dalam Republik Indonesia terjadi, terutama pada peristiwa Pepera 1969, terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan Pepera dengan metode perwakilan, sebanyak 1.206<sup>5</sup> yang mewakili jumlah penduduk Papua saat itu yang berjumlah sekitar 800.000 jiwa. Orang-orang yang mewakili itu terungkap ditunjuk dan dipilih oleh Pemerintah Indonesia, bukan atas kemauan rakyat Papua langsung.

Dalam pelaksanaan Pepera juga telah terjadi tindakan intimidasi kepada orang-orang yang ditunjuk sebagai wakil. Mereka, melalui berbagai cara, mengintimidasi para wakil untuk memilih bergabung dengan Pemerintah Indonesia. Hal ini merupakan kebenaran yang tidak dapat disangkal dan dibungkam. "The Truth can Never be Defeated: SUFFICIENT PROOFS INDICATE WEST PAPUA'S INTEGRATION INTO INDONESIA AS

---

4 Sendius Wonda, *Jeritan Bangsa, Rakyat Papua Barat Mencari Keadilan*, hal. 41. Bdk. Neles Tebay, *Papua: Its Problems and Possibilities for a Peaceful Solution*, hal. 2.

5 Sumber lain menyebutkan wakil Papua sebanyak 1.022. bdk. Budi Hernawan, *Papua Land of Peace: Addressing Conflict Building Peace in West Papua*, hal. 52.

MORALLY, LEGALLY & DEMOCRATICALLY FRAUD & UNJUSTIFIABLE, *Background and Progress Report: On the Campaign for 'A UN Internal Review Of Its Conduct' in the Act of Free Choice 1969 in West Papua, The West Papuan Peoples' Representative Office (WPPRO), Port Vila, The Republic of Vanuatu, December 2004.*"<sup>6</sup>

Distorsi terhadap sejarah Pepera 1969 merupakan ingatan sejarah rakyat Papua pada masa lalu, yang telah menjadi pengalaman penderitaan yang terjadi hingga masa kini. Penderitaan dialami oleh rakyat Papua yang menuntut pelurusan dan kebenaran sejarah Papua pada zaman sekarang.

#### • Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua terjadi karena beragam bentrokan kepentingan dan konflik, baik sosial, ekonomi, dan politik, antara Pemerintah Indonesia dan rakyat Papua yang dicap separatis atau simpatisannya.<sup>7</sup> Pelanggaran HAM terjadi sebagian besar ketika konflik antara militer atau aparat keamanan (TNI dan Polri) dengan masyarakat sipil. Kedua pihak tercatat dengan tingkat intensitas yang tinggi pada peristiwa pelanggaran HAM di Papua.<sup>8</sup>

Sebagian besar dari kasus-kasus pelanggaran HAM, pelakunya jarang dimajukan ke meja pengadilan atau

6 [www.westpapua.net](http://www.westpapua.net)

7 Socratez Sofya Yoman secara tegas menolak cap tersebut dalam bukunya yang lugas, *Orang Papua Bukan Separatis, Makar dan OPM*, (Papua Barat: Lerhamkot, 2005)

8 Bdk. Budi Hernawan, *The Practice of Torture in Aceh and Papua 1998-2007, with an annex on the situation of human rights in Timor Leste*, hal. 140-172.

didakwa, tanpa memberikan kompensasi.<sup>9</sup> Tindakan kekerasan dan kejahatan hak asasi manusia di Papua itu telah terjadi sejak 1 Mei 1963. Banyak orang Papua yang dibunuh, ditangkap, disiksa, dan mengalami beragam bentuk ketidakadilan lainnya yang mengarah pada *genocide*.<sup>10</sup>

Berdasarkan fakta-fakta tersebut tak dapat dipungkiri bahwa potensi pelanggaran HAM di Tanah Papua masih tinggi. Hal ini dimungkinkan oleh potensi konflik itu sendiri yakni: “1) *Differing political aspirations*, 2) *Misuse of Official Position and authority*, 3) *confusing governance*, 4) *suspicion between ethnic and tribal groups*, 5) *suspicion between different religious groups*, 6) *socio-ekonomik disparity*, 7) *loss of common spiritual basis*, 8) *Draining of natural resources*.”<sup>11</sup>

Untuk itu amatlah penting kedua belah pihak, dalam hal ini Pemerintah Indonesia dan Rakyat Papua atau wakilnya duduk bersama berdialog dan membicarakan penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia, terutama melakukan rekonsiliasi masa lalu menuju penyembuhan luka-luka batin, *memoria passionis* rakyat Papua.

Tuntutan rakyat Papua untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia, adalah faktor penting yang turut melahirkan Otonomi Khusus Papua.

### • Ketidakadilan dan Kesenjangan Pembangunan

Kesenjangan dan ketidakadilan pembangunan di Tanah Papua merupakan dorongan yang sangat kuat

9 Budi Hernawan, *Ibid.*, hal. 173-174.

10 Neles Tebay, *Op.Cit.*, hal. 78-79.

11 Selengkapnya lih. Budi Hernawan, *Op.Cit.*, hal. 4-7.

bagi rakyat Papua menuntut pengelolaan sumber daya alam oleh rakyat Papua sendiri. Papua, yang oleh Antonio Fegafetta disebut *Islade Oro* atau Pulau Emas, karena menjadi penyumbang terbesar terhadap pendapatan negara terutama, melalui PT. Freeport Indonesia.

Namun, kekayaan alam Papua tak berbanding lurus dengan ekonomi penduduknya. Orang-orang yang tinggal di provinsi ini menjadi daerah termiskin di seluruh wilayah di Indonesia. Di Papua, banyak dijumpai anak-anak tak mengenyam pendidikan tingkat dasar hingga jenjang berikutnya. Sekolah-sekolah di pedalaman kondisinya memprihatinkan. Generasi muda Papua tak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi karena keluarga-keluarganya didera kemiskinan.

Keadaan ini oleh Pemerintah Indonesia disiasati dengan diberikannya Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua berdasarkan UU No. 21 tahun 2001. Sayangnya Otonomi Khusus itu diartikan semata-mata persoalan keuangan. Pemerintah mengalirkan uang dalam jumlah triliunan, elit-elit pemimpin daerah di Papua menyerahkan berkantong-kantong uang kepada penduduk di kampung-kampung. Mereka tidak mengerti bagaimana menggunakan uang dengan tepat karena tidak adanya pelatihan dan pembelajaran tentang manajemen keuangan yang baik. Sehingga, uang itu 'menguap' penggunaannya.

Dalam waktu sekejap uang yang diberikan itu pun lenyap. Penduduk atau pun warga Papua tidak sadar kondisinya tetap sama: miskin dan terlantar di tanahnya sendiri. Sementara, kekayaan alam, hutan, dan tanah yang dimiliki telah berpindah tangan.

Perekonomian rakyat Papua, dalam Otsus, salah satunya diatur oleh Majelis Rakyat Papua, lembaga yang diberikan mandat melalui Undang-undang Otonomi Khusus Papua. Tetapi, lembaga MRP – lembaga representasi kultural orang Papua tidak menjadi *honai*<sup>12</sup>, tempat aspirasi orang Papua didengar dan ditindaklanjuti. Lembaga yang diberikan mandat untuk memperjuangkan hak-hak dasar orang asli Papua tak mampu berdiri di garda terdepan melindungi dan menjamin hak-hak dasar orang asli Papua terpenuhi.



Melalui tiga konteks yang melatarbelakangi lahirnya Otonomi Khusus Papua tersebut, rakyat Papua semestinya meninjau kembali untuk diletakan pada jalur yang tepat. Para pemimpin dan tokoh-tokoh Papua, bersama rakyat Papua, duduk bersama mengembalikan roh Otsus yang menjadi cita-cita dan masa depan serta kehidupan rakyat Papua yang damai dan sejahtera.

Berbagai upaya mengembalikan Otsus ke jalannya masih relevan bagi situasi Papua saat ini. Pemerintah di Jakarta dan Papua didesak untuk mengembalikan roh Otsus hari ini dalam konteks yang disebut TODAY<sup>13</sup>; *Trust* (Kepercayaan) membuat kedua belah pihak mampu untuk bekerja sama. Ketakpercayaan orang Papua akan kinerja Otsuslah yang membuat Otsus dikembalikan lewat DAP (Dewan Adat Papua) pada 12 Agustus 2005. Kepercayaan

---

12 Menarik menyimak kumpulan tulisan yang mencoba meningkatkan kinerja kerja MRP dalam Yusman Conoras (ed.), MRP, Kitong Pu Honai, (Jayapura: Fokes LSM Papua, 2008)

13 Jose Salutan, OFM dalam SAAO Fransiskan.

melahirkan Openess (keterbukaan), kemampuan untuk membuka diri, mengangkat ke permukaan persoalan-persoalan yang ada di Papua untuk dibicarakan. *Dialogue* (dialog), yang di dalamnya ada sikap mendengarkan dan menghargai satu sama lain serta menanggalkan kepentingan-kepentingan egoistik, yang tergambarkan dengan jelas pada buku *Membangun Dialog Jakarta-Papua*.<sup>14</sup>

Dialog yang demikian memunculkan sikap *Acceptance* (menerima) dan saling menghormati antara Pemerintah Pusat dan rakyat Papua, melalui organisasi dan pimpinan yang dipercaya. Sikap menerima dan jujur mengakui kesalahan masa lalu. Demikian, terciptanya suatu rekonsiliasi pada memoria passionis rakyat Papua secara ikhlas. Akhirnya terciptalah *Yearn* (rindu, harapan) yang meningkatkan kepercayaan, sehingga dialog semakin mendalam dan penerimaan satu sama lain lebih ikhlas menuju Papua Tanah Damai. Rakyat Papua bersama Pemerintah Indonesia menatap sama-sama masa depan Papua yang penuh harapan dan damai.

---

14 Neles Tebay, *Membangun Dialog Jakarta-Papua*, (Jayapura: SKP Jayapura, 2009).

---

Berbagai upaya mengembalikan Otonomi Khusus ke jalannya masih relevan bagi situasi Papua saat ini. Pemerintah di Jakarta dan Papua didesak untuk mengembalikan roh Otsus hari ini dalam konteks yang disebut **TODAY**: Trust (kepercayaan), Openess (keterbukaan), Dialogue (dialog), Acceptance (menerima), Yearn (rindu, harapan)

## —4

# Tragedi Asmat

TRAGEDI Asmat, tragedi kemanusiaan Papua. Enam puluhan anak meninggal dunia terserang campak sejak September 2017 hingga Januari 2018. Tragedi ini mengejutkan Pemerintah dan masyarakat Indonesia.

Dan lebih mengejutkan, di balik warga yang terserang virus campak, ditemukan banyak warga Asmat, dari bayi, anak-anak, hingga orang dewasa menderita gizi buruk atau malnutrisi. Mengapa tragedi ini dialami orang-orang Papua di Asmat?

...

Dua hal mendasar yang bisa menjelaskan mengapa kasus gizi buruk dan campak terjadi di Asmat. Pertama, pola hidup masyarakat Asmat yang berubah, secara khusus pola konsumsi. Masyarakat Asmat adalah masyarakat konsumtif yang meramu hasil hutan dan sungai sebagai sumber karbohidrat dan protein seperti sagu, ikan, kepiting, udang, babi hutan ataupun kasuari.

Pola ini berubah pasca adanya Otonomi Khusus (Otsus) beserta dana-dana pembangunan yang mengalir ke desa-desa dan ke kampung-kampung di Papua seperti Dana Respek ataupun Anggaran Dana Desa. Masyarakat peramu yang mengandalkan kehidupannya pada alam, kini tak lagi bekerja keras untuk mendapatkan makanan dan kebutuhan sehari-hari mereka karena telah dipenuhi dari dana-dana Otsus.

Ada mentalitas konsumtif yang bergeser, tanpa melalui bekerja keras, yang awalnya meramu alam kini 'meramu' pemerintah yang mengalirkan uang dengan dana-dana bergulir program-program pemerintah. Misalnya, Anggaran Dana Desa memberikan uang dan beras miskin (raskin) kepada masyarakat Asmat.

Masyarakat bisa selama beberapa hari menahan lapar menantikan dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah. Bahkan, sebagian masyarakat 'berhutang' untuk membeli beras, mie instan atau ikan sarden ke kios-kios para pedagang yang tersebar di seluruh Asmat hingga ke pedalaman. Barang-barang makanan itu datang dari luar Asmat. Kebutuhan makanan yang dikonsumsi dari alam kini telah tergantikan dengan makanan-makanan cepat saji yang dijual di kota Agats, ibukota Kabupaten Asmat.

Saat dana desa itu dikucurkan dan diterima oleh warga, mereka membelanjakannya. Dalam waktu singkat, uang-uang mereka berpindah ke kas-kas para pedagang, yang sebagian besar warga pendatang. Makanan yang dibeli itu bertahan dalam waktu tidak lama. Sesudah itu mereka tidak punya cukup persediaan makanan. Masyarakat juga semakin sedikit yang pergi menebar jaring, mencari ikan, yang sesungguhnya bisa memberikan penghasilan yang cukup.

Pelayanan publik yang buruk adalah hal kedua untuk menjelaskan mengapa masyarakat di Asmat rentan terserang virus, seperti campak, dan mengalami gizi buruk. Pelayanan publik itu meliputi pemberdayaan kampung, kesehatan, dan pendidikan.

Tentang pelayanan kesehatan; program posyandu dan imunisasi tidak berjalan karena tingkat kehadiran tenaga kesehatan atau pelayan kesehatan sangat rendah. Hal yang krusial juga tidak adanya pendidikan soal kesehatan untuk masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat masih mempunyai keyakinan berpikir yang belum terbuka, misalnya anggapan bila anak-anak balita disuntik bisa menyebabkan kematian.

Di beberapa daerah di Asmat, telah didukung infrastruktur, seperti balai desa, puskesmas atau puskesmas pembantu (pustu), dan sekolah-sekolah, namun infrastruktur itu tidak dimanfaatkan dengan maksimal oleh para pelayan medis. Bahkan, petugas medis dan pendidik tidak aktif dan seringkali tidak di tempat. Mereka memilih meninggalkan tugasnya untuk tinggal di kota. Akibatnya, puskesmas dan sekolah tidak terawat dan rusak.

Situasi di lapangan lain mesti dicermati, penduduk di Asmat yang sebagian besar tidak menetap di kampung – pergi meramu, kadang menyebabkan petugas medis dan pendidik tidak bekerja menjalankan tugasnya selama beberapa hari, lalu memilih kembali ke pusat kota di Agats.

Anehnya, beberapa distrik yang petugas medisnya aktif bertugas, seperti di Distrik Fayit, Distrik Suru-Suru, Distrik Sawa Erma, ditemukan kasus gizi buruk jumlahnya paling tinggi, dari 23 Distrik yang tersebar di Kabupaten Asmat.

Pemerintah daerah Asmat harus bekerja keras memperbaiki pelayanan publik, tidak hanya bidang kesehatan, juga untuk pendidikan dan pemberdayaan kampung. Pemerintah kabupaten, Bupati Asmat, harus memperkuat kontrol para aparatur sipil negara yang diberikan wewenang menjalankan tugas pelayanan umum tersebut. Pemerintah daerah Asmat harus cepat berubah, menyediakan tenaga-tenaga medis dan pendidik yang berdedikasi tinggi bagi masyarakat.

•••

SESUDAH surat kabar nasional Kompas menurunkan laporan malnutrisi dan campak di Kabupaten Asmat, tragedi kemanusiaan terungkap dengan terbuka. Selama satu minggu tragedi Asmat menjadi headline dan cover depan wajah Kompas. Sejak itu, Pemerintah di Jakarta bergerak mempedulikan situasi masyarakat di Asmat.

Asmat ditetapkan status Kondisi Luar Biasa (KLB). Beberapa menteri dan pejabat negara dari Jakarta pergi ke

Asmat, melihat langsung anak-anak dan masyarakat yang terserang campak dan gizi buruk. Hingar-bingar kehadiran para pemimpin itu sebentar saja. Dalam waktu singkat, para pejabat itu; Menteri Sosial, Panglima TNI, keluar meninggalkan Asmat, usai melakukan foto-foto sambil menggendong anak-anak. Memang, saat itu sejumlah tim kesehatan dari pemerintah, termasuk dari tim kesehatan dari militer bekerja memberikan vaksin Campak kepada ribuan anak-anak Asmat.

Setelah hampir satu bulan tindakan dari tim-tim dokter dan kesehatan pemerintah bekerja, status KLB Campak di Asmat pun dicabut pada 5 Februari 2018. Pencabutan ini menyisakan pertanyaan, bagaimanakah dengan status gizi buruk?

Sejak gizi buruk dan campak tersiar luas, bantuan berdatangan, dari obat-obatan, alat kesehatan, pakaian, dan makanan. Beberapa bulan bantuan tersebut bisa menopang kebutuhan makanan dan kesehatan masyarakat di Asmat. Penyakit virus Campak sudah tertangani, menyisakan persoalan gizi buruk.

Melihat Asmat dari dekat, kasus gizi buruk sejatinya telah sekian lama dialami oleh masyarakat. Mereka sangat rentan terserang penyakit. Kali ini bisa Campak, lain waktu penyakit lain. Ini karena mereka menghadapi persoalan mendasar dengan ketahanan pangan dan asupan gizi.

Memang buruknya asupan gizi semata-mata bukan dipengaruhi oleh ketahanan pangan masyarakat, melainkan juga adanya perubahan pola konsumsi makanan. Soal ketahanan pangan, masyarakat bisa mengandalkan sugu-sugu di hutan dan ikan di sungai. Namun, budaya

dan konsumsi masyarakat berubah dengan munculnya makanan-makanan instan yang tidak punya kandungan gizi yang kini menjadi makanan mereka, seperti: mie instan, makanan kaleng, minuman-minuman kemasan, dan sebagainya – yang masa pakai atau kadaluarsa tidak terpantau baik.

•••

Sikap Pemerintah melakukan aksi tanggap darurat kemanusiaan di Asmat pantas diapresiasi. Tetapi, peristiwa kematian orang-orang Asmat karena terserang virus campak dan gizi buruk, semestinya diselesaikan tidak seperti pemadam kebakaran. Tragedi kematian ini harus dihentikan baik di Asmat maupun daerah-daerah serupa lain di Papua yang juga terancam. Pemerintah harus berani mengambil langkah nyata untuk penyelesaian berkelanjutan agar kasus-kasus kesehatan lain tidak terulang.

Kepedulian dan pendekatan budaya yang lebih menyatu dengan masyarakat akan banyak membantu dalam memahami kehidupan masyarakat Papua. Pemerintah di Jakarta, kini dibawah kepemimpinan Joko Widodo, tak mengulang jalan penyelesaian yang bertentangan dengan budaya masyarakat, seperti kebijakan relokasi permanen masyarakat Asmat dari kampung atau daerahnya. Wacana solusi ini dinilai telah ‘membunuh’ orang Asmat karena mencabut akar hidup (tanah) dan budayanya.

Pembangunan infrastruktur, seperti yang telah menjadi alasan Pemerintah tidak bisa merespon dengan

cepat karena infrastruktur dan akses ke lokasi, bukanlah suatu alasan untuk membiarkan masyarakat Asmat dan Papua lainnya berada di tubir kematian karena standar kesehatan yang rendah dan amat buruk. Pemerintah bergegas membuka mata dan hati untuk mengerti Papua, bahwa tak semata menyilaukan dengan proyek pembangunan, tapi proyek-proyek kemanusiaan yang berkelanjutan.

---

Sikap Pemerintah melakukan aksi tanggap darurat kemanusiaan di Asmat pantas diapresiasi. Tetapi, peristiwa kematian orang-orang Asmat karena terserang virus campak dan gizi buruk, semestinya diselesaikan tidak seperti pemadam kebakaran. Tragedi kematian ini harus dihentikan baik di Asmat maupun daerah-daerah serupa lain di Papua yang juga terancam. Pemerintah harus berani mengambil langkah nyata untuk penyelesaian berkelanjutan agar kasus-kasus kesehatan lain tidak terulang.

## — 5

# HIV-AIDS: yang Mematikan dan Terlupakan

Virus HIV-AIDS menyebar masif ke masyarakat Papua. Virus itu memakan korban, yang tiap hari, bulan, dan tahun berkembang dan bertambah. Dari tahun ke tahun, orang-orang Papua yang terkena HIV-AIDS dilaporkan terus bertambah, di antaranya telah meninggal dunia. Mengapa virus mematikan ini tumbuh subur di Tanah Papua? Mengapa badai besar ini seolah terlupakan dan tak terlihat di tengah masyarakat, hingga para pemegang kuasa ini tak mampu mencegah dan menghentikan?

...

Menyebarnya virus HIV-AIDS di kalangan penduduk Papua yang begitu luas merupakan prahara buruk bagi kelangsungan hidup komunitas-komunitas masyarakat di Papua. Prahara buruk ini menorehkan kepedihan hati orang-orang Papua. Tetapi, ancaman besar itu tak membangunkan orang-orang Papua tidak bergerak cepat, terutama para pihak yang diberikan wewenang untuk menangani persoalan HIV-AIDS ini.

Dinas Kesehatan Provinsi Papua per Juni 2016 melaporkan jumlah penderita HIV dan AIDS mencapai 25.349 jiwa. Para penderita HIV-AIDS itu menyebar di seluruh daerah kabupaten dan kota di Tanah Papua. Lalu pada semester berikutnya, Desember 2016 Dinas Kesehatan Provinsi Papua kembali melaporkan jumlahnya sudah mencapai 26.973 kasus HIV-AIDS.<sup>15</sup>

Berbagai seruan, penyuluhan, maupun berbagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah akan bahaya HIV-AIDS tetap tidak mempengaruhi tingginya persentase ODHA (Orang Dengan HIV-AIDS). Hal ini membuat HIV-AIDS akan terus mengancam setiap orang dan secara perlahan menghancurkan hidup orang Papua.

Mengapa tidak ada gerakan luas dan cepat untuk menghentikan virus HIV-AIDS di Tanah Papua? Apakah para pihak yang berwenang, pemerintah di Papua dan Pusat melupakan dengan bahaya daripada HIV-AIDS? HIV-AIDS rupanya masih dipandang sebagai persoalan sekelompok orang yang mempunyai perilaku menyimpang yang berisiko tertular HIV-AIDS. Orang masih menghindar

---

15 Lihat Aventinus Jenaru OFM, Basil Triharyanto, Bernard Koten, Papua di Ambang Kehancuran: Beragam Peristiwa dan Fakta Hak Asasi Manusia di Papua 2016, Jayapura: SKPKC Fransiskan Papua, 2017, hal. 11.

seakan-akan persoalan HIV-AIDS hanyalah tugas Komisi Penanggulangan AIDS (KPA).

Orang masih berkilah HIV-AIDS adalah fenomena sesaat dan persoalan sekelompok kecil masyarakat. Alih-alih tidak ambil pusing, orang lupa bahwa HIV-AIDS kini ada di mana-mana, menyerang semua orang dari segala tingkatan usia, golongan dalam masyarakat dengan dan melalui berbagai cara. Kini kita semua dibuat tak berdaya karena telah mengabaikan orang-orang yang menderita HIV-AIDS.

Sudah saatnya kita sadar dan membangun sikap yang melahirkan perubahan, menyingkapkan keegoisan dan tidak peduli dengan persoalan HIV-AIDS ini. Dalam bahasa Ernest Renan kita “melupakan”<sup>16</sup> keegoisan kita yang tertutup dalam gheto kenyamanan pribadi untuk bersama-sama melawan HIV-AIDS.

Kehidupan kita diwarnai oleh sikap-sikap yang menutupi kesadaran dan kepedulian, seperti mentalitas sekularisme, konsumerisme, dan hedonisme. Sikap ini memupuk ‘keakuan’ kita untuk menikmati hidup sepuas-puasnya di satu sisi, dan di sisi lain menuntun kita pada ketidakpedulian akan pemaknaan hidup serta persoalan orang lain.

Sikap menikmati hidup sepuas-puasnya membuat mata budi, nurani dan iman kita tertutup akan bahaya yang mengintai di balik kenikmatan itu sendiri. Contoh paling menarik ialah Sentani Kiri, salah satu tempat lokalisasi di Papua. Sebelum masuk ada tempat ATM kondom gratis.

---

16 Bdk. Goenawan Mohamad, Catatan Pinggir 5: Papua, dalam TEMPO, 10 Desember 2000, hal. 477-479.

Sebagai manusia kita tahu bahwa kondom pada dasarnya dianjurkan pemakaiannya untuk mengurangi penyebaran AIDS. Namun peringatan pertama ini tidak mampu membuka mata kita.

Sikap ketidakpedulian akan pemaknaan hidup serta persoalan orang lain akan menumpulkan sikap *bercom-passio* (turut merasakan penderitaan dengan orang lain) dalam hidup bersama. Mentalitas 'aku-engkau' menggerus semangat 'kita'.<sup>17</sup> Oleh karena itu, ketika persoalan HIV-AIDS muncul ke permukaan, setiap orang akan berpikir itu urusan dia, urusan kamu, dan bukan urusanku. Inilah situasi terhentinya kesadaran sosial di kalangan masyarakat Papua.

Bahaya HIV-AIDS yang selalu mengintai ditunjukkan oleh hal-hal berikut<sup>18</sup> : *Pertama*, semua orang bisa terkena AIDS. Hal ini karena AIDS menular seperti Infeksi Menular Seksual (IMS) lainnya, lewat hubungan seks bebas, hubungan biologis ibu-anak, maupun melalui darah yang sudah tercemar HIV. *Kedua*, kita tidak bisa melihat apakah seseorang sudah tertular HIV hanya berdasarkan penampilannya. *Ketiga*, AIDS tidak bisa dicegah dengan obat-obatan, suntikan atau jamu-jamuan. Semua itu hanya memperpanjang kehidupan. Ini menjadikan AIDS sebagai penyakit yang belum dapat disembuhkan. *Keempat*, perilaku seks bebas yang tidak aman.<sup>19</sup>

Lalu bagaimana menghentikan HIV-AIDS ini? Sejak

17 Konsep ini dikembangkan oleh Gabriel Marcel. Konsep 'aku-engkau' yang egoistis dan mengarah ke dalam diganti oleh konsep "kita", yang memandang yang lain sebagai bagian dari 'aku'.

18 Buku Saku Penjangkau Masyarakat, Infeksi Menular Seksual, hal. 66-67

19 Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Universitas Cenderawasih

sekarang, mulai dari diri sendiri, keluarga, kelompok-kelompok dan komunitas dengan tegas menyatakan STOP AIDS. Caranya, yang utama adalah saling setia dengan pasangan.

Walaupun diketahui ada beberapa cara untuk mencegah penularannya, seperti pemakaian kondom bila berhubungan seks dengan pasangan tidak tetap, puasa seks, tidak mengkonsumsi alkohol dan narkoba, hingga pemakaian jarum suntik atau alat medis hanya sekali saja lalu dibuang hingga sirkumsisi. Bahkan muncul kasus sejumlah ibu rumah tangga yang berperilaku hidup sehat pun tanpa disangka-sangka tertular HIV-AIDS.

Kesetiaan merupakan salah satu unsur pokok dalam hubungannya dengan moral. Menurut Durkheim ada tiga unsur pokok moral.<sup>20</sup> *Pertama*, disiplin. Tanpa kedisiplinan kehidupan tidaklah berarti. Masyarakat yang disiplin mempunyai kerangka hidup yang jelas dan karenanya tidak mudah terpengaruh oleh pengaruh-pengaruh negatif dari luar. *Kedua*, kesetiaan itu sendiri. Kedisiplinan melahirkan pribadi-pribadi yang setia. Baik terhadap panggilan hidupnya, keluarganya, maupun tugas yang dipercayakan kepadanya. *Ketiga*, kesadaran akan perbuatan moral. Akhirnya kesadaran dan kepekaan akan perbuatan yang bermoral tumbuh dan karenanya menjadi prinsip hidup banyak orang. Dengan demikian setiap bentuk tindakan yang mengarah pada tindakan beresiko HIV-AIDS mudah

---

terungkap bahwa sebagian masyarakat Papua di kota dan desa berperilaku seks yang tidak aman (ganti-ganti pasangan dan tidak memakai kondom). Hal ini diperparah dengan tingginya perilaku beresiko tinggi tertular HIV. Laurike Moeliono., *Ibid.*, hal. 28.

20 Muhni, Djuretna A.Imam, *Moral dan Religi Menurut Emile Durkheim dan Henri Bergson*, hal. 16.

untuk ditangkal dan seruan STOP AIDS mempunyai pengaruh nyata dalam menghentikan perilaku-perilaku masyarakat yang berisiko terhadap penularan HIV-AIDS di Tanah Papua.

•••

HIV-AIDS telah mematikan harapan hidup dan masa depan Papua. Sudah saatnya seluruh elemen masyarakat Papua bergerak bersama secara nyata untuk menghentikan penularan HIV-AIDS. Pemerintah, Komisi Penanggulangan AIDS, Dinas Kesehatan, dan para pemimpin sudah cukup berdiam diri. Kini waktunya turun membangun gerakan perubahan hentikan HIV-AIDS. Para pihak ini menjadi motor penggerak untuk mensolidkan dan mengumpulkan energi bersama untuk melakukan aksi nyata secara terencana dan bisa diterapkan di lapangan.

---

Mengapa tidak ada gerakan luas dan cepat untuk menghentikan virus HIV-AIDS di Tanah Papua? Apakah para pihak yang berwenang, pemerintah di Papua dan Pusat melupakan dengan bahaya daripada HIV-AIDS? HIV-AIDS rupanya masih dipandang sebagai persoalan sekelompok orang yang mempunyai perilaku menyimpang yang berisiko tertular HIV-AIDS. Orang masih menghindar seakan-akan persoalan HIV-AIDS hanyalah tugas Komisi Penanggulangan AIDS (KPA).



## — 6

# Durkheim, Weber, dan Miras

*“Akar dari segala kejahatan ialah ketakutan akan kematian.*

*Ketakutan akan kematian melahirkan budak-budak yang terbelenggu oleh ketakutan, kecemasan, dan tanpa integritas diri”*

**(Gede Prama, Lukisan Indah Kebijaksanaan)**

Ada banyak masalah sosial yang menggerogoti orang Papua saat ini. Salah satunya ialah minuman keras (Miras).<sup>21</sup> Miras tidak hanya merusak sendi-sendi kehidupan dan budaya masyarakat tetapi juga merenggut nyawa. Miras telah memakan banyak korban nyawa orang Papua, meskipun demikian, tingkat konsumsi dan peredaran

---

21 Miras melahirkan banyak masalah sosial antara lain tindakan pidana dan kematian. Tindakan pidana yang dipengaruhi miras antara lain pemalangan, pengeroyokan, maupun pemerkosaan. Tercatat 59 Kasus kriminal oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak(P2TPA) dan 12 kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga(KDRT). Penyebab utamanya ialah miras di samping masalah perselingkuhan dan ekonomi keluarga. Bdk., Cenderawasih Pos, Kamis, 23 April 2009, hal. 10.

miras semakin meluas. Dua sosiolog yang terkenal dengan pemikiran-pemikirannya, Emile Durkheim dan Max Weber, akan membantu kita melihat realitas sosial tersebut. Durkheim dikenal dengan sosiologinya yang menyelidiki asal-usul dan fungsi pranata-pranata (masyarakat) dan Max Weber dengan sosiologinya yang hendak memahami dan menafsirkan tentang perilaku sosial.



Hingga akhir bulan Desember 2006 jumlah orang Papua yang meninggal akibat miras mencapai 700 orang.<sup>22</sup> Jumlah ini tentu akan terus meningkat menilik tingginya tingkat konsumsi miras di Papua. Terakhir setelah meninggalnya 2 warga Kompleks Perumahan RSUD Nabire, diberitakan lagi adanya 3 korban meninggal dan 7 lainnya dirawat di RSUD Dok II Jayapura setelah pesta miras di Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang<sup>23</sup> dan 1 korban meninggal terkena tembakan polisi setelah usaha penanganan korban oleh polisi mendapat perlawanan dan penyerangan dari korban terhadap aparat.<sup>24</sup>

Istilah miras dikenal oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Miras menunjuk pada minuman yang beretanol dengan kadar alkohol berkisar antara 1 persen hingga 55 persen v/v. Ada tiga golongan miras. Pertama golongan A dengan kadar alkohol rendah antara 1-5 persen. Kedua, golongan B dengan kadar alkohol sedang, yaitu 5-20 persen.

---

22 Pernyataan Kapolres Papua dalam Rapat Muspida Provinsi Papua akhir Desember 2006.

23 Cenderawasih Pos, Senin, 27 April 2009, hal.14.

24 Cenderawasih Pos, Kamis 07 Mei 2009, hal.1-2.

Ketiga, golongan C dengan kadar alkohol tinggi, yaitu lebih dari 20 persen.

Dalam beberapa kasus yang menyebabkan kematian di Papua, miras yang dikonsumsi kadar alkoholnya bahkan mencapai 100% atau alkohol murni yang dicampur dengan minuman bersoda serta obat tertentu. Ini disebut miras oplosan.<sup>25</sup> Selain miras jenis oplosan masih terdapat jenis yang lain. Menurut pengamatan saya di beberapa tempat penjualan miras legal antara lain terdapat anggur, *bir*, *brandy*, *jenewer*, *vodka*, *whisky*.<sup>26</sup> Selain itu terdapat pula minuman lokal (Milo) seperti arak, segero, tuak, cap tikus, balok.

Mengapa sampai menyebabkan kematian? Kadar alkohol yang melebihi kemampuan tubuh untuk mengimbangnya menyebabkan sakit hagogover dan keracunan. Gejala hagogover antara lain sakit kepala, mual-mual, dehidrasi, maupun pusing-pusing. Keracunan dapat bersifat ringan (sempoyongan) sampai berat (tak sadarkan diri). Keracunan berat bila mencapai lebih dari 12 jam dapat menyebabkan kematian.

### **Pemikiran Durkheim dan Weber** <sup>27</sup>

Sosiologi Emile Durkheim bertolak dari pandangan

---

25 Bdk., Cenderawasih Pos, Op.Cit., Miras oplosan yang dikonsumsi merupakan campuran antara alkohol murni, sprite, coca-cola, dan obat betadine yang diperkirakan hampir 10 liter.

26 Bdk. Isir, Robert, Dimensi-Dimensi Bahaya Minuman Keras (Alkohol) Beracun dan Membawa Maut, Jayapura, Komite Jaringan Doa Sahabat Papua dalam penelitian Minuman Keras (Miras) dalam Kehidupan Orang Papua, Tim Peneliti STFT Fajar Timur, Februari-Juli 2008, hal.4.

27 Diktat Kuliah Pengantar Sosiologi, Bab V: Manusia Serba Dua, hal. 133-195. Bdk., Giddens. Anthony., Kapitalisme dan Teori Sosial Modern, secara khusus tentang Durkheim dan Max Weber, hal. 81-207.

bahwa manusia ditertibkan oleh nilai-nilai, peraturan dan suatu sistem kontrol sosial yang seolah-olah dari luar dikenakan padanya. Masyarakat mendidik orang supaya menahan diri (*moderation*), membatasi diri (*limitation*), dan berdisiplin. Disintegrasi masyarakat dan perilaku menyimpang dari pola-pola normatif yang umum disebabkan oleh anomie yaitu keadaan renggangnya nilai-nilai, peraturan-peraturan dan kontrol sosial yang mengatur individu.

Durkheim berpegang pada dua prinsip dalam mengembangkan sosiologinya. Pertama, sosiologi harus bersifat ilmiah dalam pengertian positivisme. Maksudnya fenomena sosial harus dipelajari secara objektif dan diterangkan secara kausal. Kedua, keterangan sosiologi akan 'fakta' sosial harus khas sosiologi. 'Fakta' sosial yang dimaksud ialah cara melihat realitas sosial (struktur masyarakat, nilai-nilai agama, adat, maupun bunuh diri) sebagai objek.

Objek sosiologi ialah perilaku sosial. Disebut 'sosial' jika menjadi bagian dari suatu sistem sosial dan berorientasi kepada lingkungannya. Lingkungan yang dimaksud ialah lingkungan fisik dan lingkungan non fisik (tradisi, masa lampau, tata nilai, pola-pola perilaku). Lingkungan fisik berbeda dengan lingkungan sosial. Jika lingkungan fisik hanya menciptakan kondisi-kondisi, lingkungan sosial menciptakan juga tujuan-tujuan dan norma-norma pada lingkungan fisik.

Ia juga mengiyakan corak batin terutama unsur-unsur pokok kebudayaan dan struktur sosial yang dibatinkan oleh individu. Internalisasi ini melahirkan kesadaran kolektif yang oleh Durkheim dibuktikan dengan:

*Pertama*, adanya kejadian-kejadian tatkala orang bertindak atas cara yang tidak sesuai dengan apa yang dipikirkannya. *Kedua*, pola tingkah laku kelompok yang berbeda dari pola tingkah laku individu. *Ketiga*, adanya 'kesadaran kolektif' yang melatarbelakangi kestabilan angka statistik gejala sosial.

Lalu bagaimana pemikiran Max Weber? Max Weber berpandangan bahwa manusia digerakkan dari dalam batinnya. Maka, sosiologi Weber ialah ilmu tentang perilaku sosial dengan tekanan pada keyakinan, motivasi dan tujuan yang memberi isi dan bentuk pada perilaku manusia. Perilaku yang dimaksud bersifat subjektif; pelaku mempunyai tujuan atau ia didorong oleh motivasi tertentu. Sedangkan bersifat sosial jika maksud subjektif perilaku individu memperhitungkan kelakuan orang-orang lain dan terarah pada orang lain.

Weber melihat realitas sosial sebagai strategi yang disusun oleh individu-individu yang bertindak dengan sadar atau rasional. Menurutnya perilaku sosial selalu berakar dan bertolak pada kesadaran individu. Artinya bukan karena melemahnya kekangan norma sosial atas individu melainkan keseragaman individu, ketidaktahuannya dan penghilangan subjektifitasnya.

Weber mengklasifikasikan perilaku sosial dalam empat tipe. *Pertama*, kelakuan yang diarahkan secara rasional kepada tercapainya suatu tujuan. *Kedua*, kelakuan yang berorientasi pada suatu nilai. *Ketiga*, kelakuan afektif, yang menerima orientasinya dari perasaan atau emosi seseorang. Keempat, kelakuan tradisional, yang menerima arahnya dari tradisi.

## Analisa Masalah

Dalam kaca mata Durkheim, secara kausal sudah jelas. Penyebab kematian yaitu konsumsi miras yang berlebihan. Konsumsi miras yang berlebihan ini dimungkinkan oleh kemudahan memperoleh miras yang dijual, entah dengan izin atau legal, entah tanpa izin atau ilegal.

Kematian akibat miras merupakan suatu masalah sosial dan 'fakta' sosial. Masalah 'sosial' karena menjadi bagian dari sistem sosial dan berorientasi pada lingkungan. Namun lingkungan fisik maupun lingkungannya tidak terinternalisasi yang berimbas pada rendahnya bahkan tidak adanya kesadaran sosial (*conscience collective*). Untuk itu diperlukan hukuman.<sup>28</sup> Namun berhadapan dengan kematian, hukuman sama sekali tidak berfungsi.

Dalam kaitannya dengan bukti akan adanya kesadaran kolektif Durkheim, kita tidak dapat menyangkal kebenaran bukti-bukti yang dikemukannya, seperti kematian yang disebabkan setelah mengonsumsi miras atau sesudah pesta miras. Artinya hal itu dilakukan secara berkelompok. Dengan demikian ada kemungkinan ketidaksesuaian antara tindakan dan apa yang dipikirkan serta tingkah laku yang berbeda. Selain itu terlihat adanya kenaikan tingkat kematian akibat miras.

Kesimpulannya, kematian akibat miras disebabkan oleh anomi, mengendurnya nilai-nilai, peraturan, dan kontrol sosial yang mengatur individu. Faktor sosial yang menyebabkannya ialah disintegrasi individu dengan

---

28 Menurut Durkheim hukuman diperlukan untuk melindungi dan menegaskan lagi *conscience collective* di hadapan tindakan-tindakan yang mempertanyakan kebenarannya. Bdk., Giddens, Anthony., Ibid., hal. 92-94.

kelompoknya atau dalam istilah lain 'bunuh diri egoistis' dan hilangnya norma, atau dalam istilah ini disebut 'bunuh diri anomi'.

Bertolak dari pemahaman akan sosiologi Weber, kematian akibat miras merupakan perilaku sosial<sup>29</sup> yang paradoks. Di satu sisi perilaku konsumsi miras yang telah merenggut nyawa merupakan tindakan subjektif, yang didorong motivasi dan tujuan tertentu walaupun tidak sesuai dengan norma-norma yang telah diakui. Di sisi lain, perilaku itu tidak bersifat sosial karena tidak memperhitungkan orang lain dan tidak terarah pada orang lain. Ketidakterarahan yang dimaksud dapat dilihat pada keragaman motif maupun tindakan yang spontan. Artinya tidak berakar pada kesadaran individu dan pertimbangan rasional.

Selanjutnya, perilaku sosial menurut Weber, kematian akibat miras itu dapat dimasukkan sebagai perilaku tradisional.<sup>30</sup> Perilaku mengonsumsi miras dilakukan di bawah pengaruh kebiasaan. Kalau melihat situasi di Papua, pola konsumsi miras sudah menjadi kebiasaan yang menjamur. Hal ini 'bisa terjadi',<sup>31</sup> terlepas tentang perdebatan hal itu merupakan budaya orang Papua atau budaya baru yang dibawa masuk.

---

29 Perilaku sosial(*soziales handeln*), mempunyai dua makna, perilaku sosial dapat dianalisis dalam acuan kepada arti konkret yang dimiliki oleh tindakan bagi tiap pelaku tertentu ataupun dalam kaitannya dengan suatu jenis ideal dari arti subjektif dari pihak seorang pelaku hipotetis. Bdk. Giddens, Anthony., *Ibid*, hal. 180.

30 Perilaku 'tradisional' meliputi pula batas-batas dari perilaku yang berarti dan yang tak berarti. *Ibid.*, hal.188.

31 Sosiologi tafsiran Weber melihat bahwa keseragaman perilaku yang ditemukan hanya bisa diungkapkan dalam kaitan dengan suatu kemungkinan dengan menekankan kontras antara perilaku yang berarti dengan respon konstan. *Ibid.*,

Perbedaan kedua pemikir ini terletak pada penekanan Weber akan kesadaran individu dan penekanan Durkheim pada pengendalian dari luar (masyarakat). Subyektivisme amat naif tanpa kontrol masyarakat. Sebaliknya, pranata (masyarakat) hanyalah utopia tanpa kesadaran individu. Oleh karena itu, baik keinsyafan individu akan bahayanya miras maupun pemaksaan norma-norma sosial oleh masyarakat merupakan dua hal yang hakiki dan saling mengisi.

•••

Kematian akibat miras semakin meresahkan masyarakat. Apalagi miras sudah menjamur di mana-mana dan dikonsumsi oleh semua kalangan. Di tengah krisis keteladanan para pemimpin<sup>32</sup> yang juga mengonsumsi miras, kesadaran setiap individu yang dibarengi pengetahuan akan bahaya miras serta peran aktif seluruh lapisan masyarakat menjadi titik terang dalam memerangi miras.

---

32 Bdk., *Cenderawasih Pos*, Senin, 4 Mei 2009, hal. 4.

---

Kesimpulannya, kematian akibat miras disebabkan oleh anomi, mengendurnya nilai-nilai, peraturan, dan kontrol sosial yang mengatur individu. Faktor sosial yang menyebabkannya ialah disintegrasi individu dengan kelompoknya atau dalam istilah lain 'bunuh diri egoistis' dan hilangnya norma, atau dalam istilah ini disebut 'bunuh diri anomi'.



## — 7

# Stigma Pemabuk

DALAM hidup sehari-hari, kita tak bisa menutup mata, sejumlah orang Papua terlihat mabuk karena mengonsumsi minimal beralkohol, atau dikenal minuman keras (miras), baik pada siang maupun malam. Mereka melakukan tidak hanya di tempat-tempat tertutup, namun juga terlihat terang-terangan, seperti di jalanan maupun warung-warung atau tempat-tempat di pinggir jalan.

Melihat kondisi itu, lalu bertanya apakah orang Papua itu pemabuk? Pertanyaan ini sering terlontar, dan terus dipakai untuk memberikan label kepada orang Papua. Memang tidak bisa diabaikan fakta terlihat orang-orang Papua yang semakin banyak mengonsumsi minuman keras hingga mabuk, namun tidak bisa dibenarkan bila hal itu digunakan untuk menstigma orang Papua pemabuk atau orang Papua kerjanya mabuk-mabukan.

Sebutan ‘pemabuk’, ‘tukang mabuk’, seolah-olah itu menunjukkan sebuah profesi. Padahal, orang-orang yang mengonsumsi miras, minuman beralkohol hingga mabuk bukan hanya orang Papua, tetapi juga orang-orang non-Papua. Tetapi, mengapa “orang Papua” disebut pemabuk?

Ada dua alasan yang dapat dikemukakan di sini. Pertama, alasan antropologis. Secara antropologis, tidak ada budaya mabuk dan budaya minuman keras di dalam hampir semua suku di Papua. Beberapa suku memang mengonsumsi minuman keras lokal namun itu hanya dilakukan pada momen-momen tertentu yakni dalam pesta Adat. Misalnya, masyarakat Marind di Merauke dengan *Wati*. Masyarakat di Biak dan Serui yang mengonsumsi *Saguer* dan *Bobo*.

Orang Papua juga tidak memproduksi, mendistribusi serta mengonsumsi minuman keras. Produsen sekaligus distributor utama di Papua adalah para pendatang dan para pengusaha dari luar Papua. Para pendatang memproduksi sekaligus mendistribusikan minuman keras lokal seperti *cap tikus*, *saguer*, maupun *balo*. Para pengusaha mendistribusikan minuman keras berlabel resmi seperti Wiro, Vodka, Chivas, maupun Martini. Ironisnya, para pendatang, meskipun mengonsumsi miras tidak menjadi mabuk, sebaliknya jika orang Papua yang mengonsumsinya menjadi mabuk.

Kedua, alasan sejarah. Menurut sejarah, minuman keras masuk ke Papua pada tahun 1990-an. Dalam perkembangannya peredaran miras di Papua menjadi tidak terbendung. Pada 2010, sekelompok mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi Fajar Timur Jayapura, Papua, melakukan riset peredaran minuman keras, hasilnya

ditemukan sekitar 70 toko di kota Jayapura menjual minuman keras secara legal. Jumlah toko itu diluar mereka yang menjual secara tidak resmi atau sembunyi-sembunyi.

Untuk membendung hal ini, ditetapkanlah aturan legal peredaran miras di Papua. Legalitas ini di satu sisi membatasi, di sisi lain membebaskan peredaran miras di Papua. Dengan demikian, nota kesepakatan yang dibuat oleh para pemimpin di Papua belum memberikan kontribusi signifikan bagi pencegahan dan solusi agar orang Papua tidak lagi menjadi korban minuman-minuman keras. Dampak orang Papua mengonsumsi miras telah menciptakan situasi-situasi destruktif, seperti pencurian, pemalangan, kekerasan seksual, kecelakaan lalu lintas maupun kekerasan dalam rumah tangga.

Pada 30 Maret 2016, Gubernur Papua dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOMPINDA) Papua menandatangani Pakta Integritas Pelarangan Minuman Keras di Papua yang diperkuat dengan Instruksi Gubernur Papua Nomor 3/INSTR-GUB/Tahun 2016. Fakta ini bisa dikatakan menjadi solusi bagi dampak destruktif produksi, distribusi, dan terutama konsumsi miras di Papua.

Ada banyak perangkat hukum yang mengatur tentang Minuman Keras. Perangkat-perangkat hukum itu antara lain: Kepres No.3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Keras, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 359/MRP/Kep/10/1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Produksi, Impor, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. Dalam konteks Papua ada Perda Kota Jayapura No. 7 tentang Pemasukan Minuman Beralkohol, Perda Kota Jayapura

No. 3 tentang Pelarangan Produksi, Pemasokan, Pengawasan dan Pengendalian Pengedaran serta Mengonsumsi Minuman Beralkohol. Kedua Perda ini pun telah dibuat di Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Mimika, Kabupaten Biak, Kabupaten Manokwari maupun kabupaten-kabupaten lain di Papua.

Peraturan-peraturan tersebut tidak ditegakkan dengan benar di Papua, hingga saat ini orang Papua marak mengonsumsi miras di berbagai tempat. Kesulitan penerapan peraturan itu diduga terkait peredaran miras yang dilakukan pengusaha didukung oleh aparat keamanan. Di Asmat, misalnya, sebagaimana diakui sendiri oleh Bupati Elisa Kambu dan Wakil Bupati Thomas Safanpo, menghadapi kendala dalam pelarangan dan peredaran miras ini. Berbagai pendekatan yang dilakukan sering selesai pada tahap diskusi dan kesepakatan tanpa adanya eksekusi di lapangan.

### **Solusi Menyeluruh**

Nota kesepakatan bersama untuk menolak minuman keras di Papua adalah angin segar, kabar baik, tidak hanya bagi usaha untuk menyelamatkan generasi muda sebagai generasi masa depan Papua, tetapi terutama sebagai usaha preventif yang dilakukan oleh pemerintah untuk memutus mata rantai berbagai persoalan sosial di Papua akibat miras seperti ketidakamanan dan ketidaktertiban umum, tingginya angka kekerasan dan kematian, penyakit-penyakit fisik, maupun rendahnya kualitas sumber daya manusia Papua. Akan tetapi, nota kesepakatan yang

berdampak hukum, mesti ditopang oleh kesadaran orang asli Papua sendiri akan bahaya minuman keras.

Hal yang terakhir yang disebutkan membutuhkan solusi tersendiri dengan mengacu pada aspek antropologis dan aspek sejarah di atas. Pertama, kesadaran budaya atau kesadaran akan kearifan lokal bahwa orang Papua tidak mempunyai budaya mabuk atau budaya mengonsumsi minuman keras perlu ditanamkan secara terus-menerus kepada generasi muda Papua. Bahwasannya, budaya mabuk-mabukan adalah hasil interaksi dengan budaya lain yang memang tidak dapat dinafikan begitu saja dan karenanya bukanlah sifat-sifat hakiki atau asali dari budaya atau suku-suku yang ada di Papua.

Kedua, fakta sejarah bahwa minuman keras hadir di Papua karena dibawa dari luar Papua, mesti ditindaklanjuti dengan konsekuensi hukum yang jelas bagi pihak-pihak yang tetap mendistribusikan minuman keras di Papua pasca nota kesepahaman penolakan minuman keras di Papua. Tanpa peraturan daerah (Perda) atau peraturan daerah khusus (Perdasus), sebagai tindak lanjut nota kesepakatan ini terasa tumpul. Fakta menunjukkan bahwa meskipun sudah ada Peraturan Daerah yakni Perda Nomor 15 tahun 2013 tentang Pelarangan Miras di Papua, miras tetap beredar luas di Papua. Dengan fakta ini, bukan tidak mungkin akan menjamur distribusi tidak resmi minuman keras yang sulit dikontrol, merugikan pendapatan daerah dari pajak minuman keras itu sendiri.

Persoalan miras di Papua telah memakan banyak korban orang asli Papua dan menghancurkan generasi masa depan Papua. Jalan keluar yang sudah diinisiatif oleh

pemerintah secara hukum, juga orang Papua harus kembali kepada budaya dan sejarah orang Papua sendiri untuk menghadapi budaya luar yang destruktif. Kesadaran budaya dan sejarah orang Papua akan menyelamatkan bangsa dan masa depannya. Hal ini ada di pundak orang asli Papua. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau menyelamatkan tanah dan manusia Papua?

---

Nota kesepakatan bersama untuk  
menolak minuman keras di Papua  
adalah angin segar, kabar baik, tidak  
hanya bagi usaha untuk menyelamatkan  
generasi muda sebagai generasi masa  
depan Papua, tetapi terutama sebagai  
usaha preventif yang dilakukan  
oleh pemerintah untuk memutus  
mata rantai berbagai persoalan  
sosial di Papua akibat miras seperti  
ketidakamanan dan ketidaktertiban  
umum, tingginya angka kekerasan dan  
kematian, penyakit-penyakit fisik,  
maupun rendahnya kualitas sumber  
daya manusia Papua. Akan tetapi,  
nota kesepakatan yang berdampak  
hukum, mesti ditopang oleh kesadaran  
orang asli Papua sendiri akan bahaya  
minuman keras.



## —8

# *Ko Kerja Ko Ada*

PEMEKARAN Tanah Papua dengan sebutan ‘proyek daerah otonom baru’ membuat gagap dan bahkan *shock* bagi masyarakat Papua. Karena tidak siap dengan perubahan itu, masyarakat menjadi korban dari dampak proyek otonomi daerah itu. Eli Logo, seorang warga di kampung Yiwika, Wamena, mengungkapkan, “Banyak orang Papua maunya pemekaran-pemekaran terus padahal sebenarnya kita belum siap menjadi daerah otonom baru. Nanti kalau sudah pemekaran, tentara masuk, polisi masuk, pendatang masuk, dan lain-lain. Kita yang tuan rumah akhirnya jadi penonton hingga disingkirkan dari tanah sendiri ke pinggir-pinggir kota.”

...

Papua ditetapkan sebagai daerah Otonomi Khusus pada 2001. Wilayah Papua diberikan kewenangan untuk

mengelola dana Otonomi Khusus yang dikucurkan mencapai triliunan rupiah. Pada 2017 lalu dana Otsus Papua mencapai Rp 11,67 triliun, terbagi untuk Provinsi Papua Rp 8,2 triliun dan Provinsi Papua Barat sebesar Rp 3,47 triliun. Tahun 2018 ini jumlahnya meningkat sebesar Rp 12,3 triliun, Rp 8 triliun untuk Provinsi Papua dan Papua Barat sebesar Rp 4,3 triliun. Lalu, bagaimana orang Papua menjalani kehidupannya dengan dana Otsus itu? Apakah dana yang besar mencapai triliunan itu memerdekakan orang Papua dari kemiskinan atau terpinggirkan dari akses ekonomi, pendidikan, kesehatan, maupun pelayanan publik lainnya?

Barangkali bagi orang asli Papua, aspek ekonomi masih dipahami sebatas memenuhi kebutuhan perut, mendapatkan makanan dan minuman gratis, tanpa bekerja. Begitu ada dana Otsus, Alokasi Dana Desa (ADD) dan dana-dana lain yang dikucurkan oleh pemerintah pusat, provinsi maupun daerah diterima tanpa pengelolaan yang baik. Seorang warga kampung Warse, kabupaten Asmat, Yoel Basipok mengatakan, “Kalau ada ADD, berarti ada makan. Proyek dan program itu nanti.”

Para pejabat bupati turun ke kampung-kampung dengan bangganya membawa uang kas bertumpuk-tumpuk dibagikan kepada para kepala kampung untuk dimanfaatkan oleh masyarakatnya. Namun, ada yang terlupakan oleh para kepala daerah itu, masyarakat tidak diajari bagaimana mengelola, menggunakan, dan memanfaatkan uang itu dengan baik. Proses pendidikan keuangan, pelatihan keterampilan, dan pengembangan sektor-sektor seperti pertanian, tidak pernah tersentuh.

Baginya, tugas sebagai kepala daerah selesai setelah datang ke kampung-kampung dan menyerahkan uang langsung di hadapan masyarakat.

Para pemimpin itu tidak memikirkan uang itu terbatas, masyarakat akan bisa hidup saat memegang uang, tidak perlu bekerja lagi karena sudah ada uang. Mereka tidak memikirkan masyarakatnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran lebih panjang lagi.

Theo Kossay, seorang tokoh agama di Wamena, berujar, “Masyarakat di Baliem sekarang tidak kerja kebun lagi. Ada dana macam-macam dari pemerintah buat masyarakat malas kerja. *Hipere degho nayak* (ubi tidak ada). Masyarakat makan nasi dan supermi saja.” Masyarakat lalu berhenti kerja untuk sementara hingga dana habis terpakai. Kebun jadi hutan. Sagu dan ikan di pasaran kosong.

“Dana-dana dari pemerintah ini lebih banyak merusak kita orang Papua. Kita terima uang banyak di tangan tapi hanya *transit* saja. Pegang 10 juta hari ini, besok uang sudah pindah ke pedagang Jawakah, Butonkah, yang punya kios-kios itu,” kata Basipok, penduduk dari kampung Birak.

### **Ko Kerjakah Tidak?**

Dana Otonomi Khusus dan beragam pengucuran dana langsung dari sejumlah program kepada masyarakat dan penduduk di kampung-kampung Papua tampaknya memberikan dampak negatif, terutama bagi mentalitas orang Papua. Dana-dana itu telah melunturkan budaya kerja dan bertahan hidup di kalangan penduduk Papua. Dampak negatif itu berkepanjangan, bersamaan dengan para pejabat

dan pimpinan setempat melupakan instrumen penting bagi perubahan masyarakat Papua yaitu pendidikan, proses belajar, dan sebagainya.

Pendidikan merupakan instrumen untuk membuka kesadaran, memperkaya pengetahuan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pendidikan akan melahirkan ide-ide dan kerja kreatif masyarakat. Penduduk akan bijak menghargai uang yang diterimanya, dan menjadi sarana untuk menumbuhkan perekonomiannya.

Karena terlupakan sekian dekade, pendidikan dan proses pembelajaran yang dibangun di atas kesadaran orang-orang Papua membutuhkan waktu lama lagi. Proses penyadaran lebih keras untuk mengubah kultur dan pemahaman lama, seperti anggapan pendidikan itu hanya buang-buang waktu dan uang, lalu tinggal di kampung lebih berguna karena bisa membantu orang tua mencari sagu atau ikan. Jika sekolah untuk mendapatkan kerja dan untuk menjadi pegawai, guru, bupati, dan sebagainya, tidak sekolah pun tetap bisa bekerja juga, seperti nelayan, petani, peramu ikan dan sagu, buruh angkutan pelabuhan, buruh bangunan atau di pasar.

Sesungguhnya, orang asli Papua punya filosofi hidup atau nilai-nilai tentang kerja yang sudah berkembang dan tumbuh dalam tradisi keluarga-keluarga masyarakat Papua. Hal ini diungkapkan oleh seorang cendekiawan muda Asmat, Moses Amiset, “Bagi kami nilai kerja lebih penting. Pendidikan itu hanya sarana. Bukan berapa banyak waktu *ko* kerja atau berapa pendapatan (uang) yang *ko* hasilkan.” Ia mengatakan lagi, “*Ko* akan dicemooh di masyarakat kalau *ko* tidak kerja, bukan karena *ko pu* (kau punya) pekerjaan

apa. Lebih dari pada itu, *ko* makin dihargai jika hasil kerjamu dibagi rata dengan semua keluarga atau klan.” Hal ini tidak mengherankan karena bagi orang Papua, aspek sosial, kekeluargaan, suku dan klan dengan nilai kesetaraan dan semangat berbagi adalah amat pokok dan mendasar.

Maka pendidikan bagi orang asli Papua ialah menjadikan mereka orang baik yang hidup baik. “Orang Baik menurut budaya Asmat sendiri, tidak hanya “kus-cenam” (cerdas/pintar di otak) tapi haruslah mencakup unsur penting ini: “biminip-akat” (pikiran baik) dan “Jak-akat” (hati baik),” terang Charles Loyak, pemerhati Budaya Asmat. “Hidup baik mencakup hubungan dengan Tuhan, roh para leluhurnya, sesama dan alam lingkungannya,” lanjutnya.

Ini bukan hanya bagi orang Asmat tapi bagi orang Papua pada umumnya. Maka, jangan heran jika orang asli Papua selalu *welcome* dengan orang asing, tanpa syak dan prasangka. Tapi ketika kehadiran berbagai pihak, baik institusi negara maupun individu seperti pendatang, dianggap merusak tatanan hidup mereka, maka jangan kaget kalau dicap parasit atau pencuri. Seperti yang dikatakan Yulius Uropmabin kepada saya dalam pertengkaran kecil, “Kamu pendatang itu datang ke Papua hanya untuk cari makan saja, peras semua kami punya sumber daya alam. Tidak tahu malu, pulang kembali ke tempatmu.”

Lain halnya aspek kesehatan. Aspek ini cukup mendapat tempat dalam cara pikir dan kehidupan orang asli Papua. Meskipun demikian, penyebab sakit dan penyakit tidak pertama-tama dilihat sebagai akibat menurunnya daya tahan tubuh atau karena terserang virus dan bakteri

tertentu tetapi sebagai perbuatan roh atau kekuatan jahat dengan perantaraan seorang dukun kampung atau karena relasi dengan roh nenek moyang yang terganggu. Oleh karena itu kalau ada orang sakit atau wabah penyakit aneh tertentu, misalnya HIV-AIDS, dukun dan rumah adat menjadi rujukan pertama. Pada zaman sekarang, setelah adanya puskesmas dan rumah sakit, mereka akan memeriksakan diri ke dokter. Namun jika pengobatan medis tidak menyembuhkan, mereka akan kembali ke dukun dan rumah adat untuk memakai penyembuhan tradisional (Alfons Sowada, 1968: 190). Hal ini dibenarkan oleh Moses Amiset dari Suku Asmat maupun Edi Doga dari Suku Hebula di Wamena.

Dalam kaitannya dengan aspek-aspek di atas, tidaklah mengherankan jika kemunduran dan ketimpangan dalam aspek budaya menjadi sorotan bagi setiap suku di Papua. Berbagai macam persoalan pun dilihat sebagai akibat dari pengabaian terhadap nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. Banyak pemuka dan tetua adat mengeluhkan generasi muda yang lupa pada budayanya, rumah adat yang tidak lagi menjadi tempat untuk duduk, berdiskusi dan memecahkan persoalan hidup bersama. Banyak aturan adat yang dilanggar. Nilai-nilai baru merusak nilai-nilai adat. Yang muda tidak lagi mau mendengar yang tua. Yang tua mudah digoda oleh pemerintah dan tawaran kekuasaan politik.

“Ada banyak kampung yang tidak lagi mempunyai Jew (rumah adat orang Asmat). Aturan-aturan adat dilanggar ketika melakukan pesta atau ritual adat. Adat sudah tidak lagi asli. Makanya sekarang ada banyak penyakit aneh, orang mabuk di mana-mana, kampung-kampung tidak subur,

anak-anak tidak tahu lagi adat,” demikian pengakuan seorang tetua Asmat.

“Dulu, sebelum mengenal sekolah, jika melewati jalan di tengah kampung, anak-anak perempuan selalu menundukkan kepala. Tetapi sekarang tidak lagi. Mereka berjalan sambil mengangkat kepala, mata liar ke kanan dan ke kiri bahkan berani menggoda laki-laki. Ini hal yang memalukan,” kata tetua adat dari Sawa Erma (Alfons Sowada, 1968:197).

•••

Memahami Papua dari beragam sisi; ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, politik, bahkan keamanan, itu berarti memahami manusia dan alam Papua. Namun, yang terjadi saat ini, pemahaman baru soal beragam sisi di atas sering menggunakan pemaksaan kepentingan inividu dan kelompok tertentu, sehingga baik institusi sosial maupun negara, keliru memahami Papua, yang orang-orang atau masyarakatnya mengutamakan kehidupannya yang selaras dengan leluhur, sesama, dan alam ciptaan.

---

Seorang cendekiawan muda Asmat, Moses Amiset mengatakan, "Bagi kami nilai kerja lebih penting. Pendidikan itu hanya sarana. Bukan berapa banyak waktu ko kerja atau berapa pendapatan (uang) yang ko hasilkan." Ia mengatakan lagi, "Ko akan dicemooh di masyarakat kalau ko tidak kerja, bukan karena ko pu (kau punya) pekerjaan apa. Lebih dari pada itu, ko makin dihargai jika hasil kerjamu dibagi rata dengan semua keluarga atau klan."

## — 9

# Wajah Buruk Pendidikan

*“seorang anak yang tidak bersekolah adalah seorang anak yang hilang.”*

**John F. Kennedy**

KORNELIS Kone dan Yanuarius Aman, biasa disapa Yance remaja asal kampung Biwar Laut, Asmat. Keduanya duduk di kelas sembilan, sebentar lagi akan masuk ke SMA. Namun Kornelis dan Yance belum bisa berhitung, seperti pengurangan, penjumlahan, pembagian, dan perkalian. Bahkan, Kornelis belum bisa mengetahui waktu atau jam, sementara Yance belum lancar membaca. Demikian, potret pendidikan di Papua.

### **Asmat: Potret Kecil**

Daerah Asmat, salah satu potret kecil situasi pendidikan di wilayah Papua. Kornelis dan Yance, contoh anak-anak pelajar yang masih mengalami buta huruf. Mengapa situasi pendidikan di Papua tampak buruk, khususnya di pedalaman dan daerah terpencil?

Di Asmat, pendidikan atau sekolah bermutu hanya terletak di pusat kabupaten, yaitu di kota Agats, yang tersedia jenjang pendidikan dari PAUD hingga SMA/SMK. Proses pendidikan dan kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik.

Keluar dari kota Agats, di distrik-distrik lain, ditemukan banyak persoalan dengan pendidikan. Di desa Karbis, misalnya, kondisi bangunan sekolah rusak parah. Tidak ada guru di sekolah itu yang bertugas, Kepala Sekolah itu tidak berada di tempat, melainkan tetap tinggal di kota Agats. Ia pergi ke sekolah pada hari ujian sekolah tiba.

Di desa Warse, ada berdiri gedung sekolah, tetapi tenaga pendidik atau guru tidak ada di tempat, kecuali kepala sekolahnya yang bekerja tidak penuh waktu karena ia mengerjakan pekerjaan sampingannya. Sekolah di desa Amborep pun hampir sama kondisinya, seorang kepala sekolah setia berada di sekolah bersama seorang guru honorer. Sementara guru-guru lainnya tinggal di kota Agats.

Situasi dan kondisi sekolah-sekolah itu hampir dialami di tiap distrik di Asmat, kecuali di Distrik Sawa Erma yang memiliki sebuah sekolah dengan pola asrama atau suka dinamakan pendidikan satu atap. Karena tidak ada guru

di sejumlah distrik itu, seorang Pastor Paroki Suator, RD. Hilarius Salmon Pr, turut menjadi pengajar di sekolah daerah itu.

Tidak adil jika menilai bahwa seluruh proses pendidikan di Papua pada umumnya dan di Kabupaten Asmat pada khususnya tidak berjalan maksimal. Akan tetapi seberapa besar memang demikian adanya. Beberapa fakta dari lapangan dapat memberikan sedikit gambaran tentang kondisi tersebut.

Asmat, barangkali sebuah potret kecil dari praktik-praktik pendidikan di Tanah Papua. Tentu, ada pendidikan yang baik, terutama sekolah-sekolah di kota. Namun, faktanya memang masih banyak pendidikan di Papua yang buruk. Mengapa?

Pada 2016 lalu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua, Elias Wonda menyatakan bahwa kabupaten/kota diharapkan memaksimalkan besaran alokasi dana Otsus sebesar 30 persen untuk bidang pendidikan. Pernyataan ini ia sampaikan karena secara umum kabupaten/kota lamban mendorong kemajuan pendidikan di daerah masing-masing. Di kabupaten Merauke, misalnya, anggaran untuk pendidikan besarnya hanya 18 persen, tidak sesuai dengan perintah undang-undang yang mengamanatkan serendah-rendahnya anggaran sebesar 20 persen dari APBD/APBN.

Kelambanan perbaikan layanan dasar dalam bidang pendidikan menguatkan indikasi akan rendahnya kinerja maupun tidak berjalannya peran pemerintah sebagai pengawas utama proses pendidikan. Walaupun, berbagai usaha pemerintah daerah di beberapa kabupaten memberi

harapan akan perbaikan yang lebih baik patut diapresiasi. Tetapi secara umum kualitas pendidikan di Tanah Papua masih rendah dan memprihatinkan.

Keprihatinan ini beralasan karena masih ditemukannya bermacam-macam persoalan dalam pendidikan di Papua. Beragam persoalan itu muncul karena banyak menyentuh berbagai pihak yang terlibat dalam menyelenggarakan pelayanan di bidang pendidikan, di antaranya pihak pemerintah, tenaga pendidik, peserta didik. Hal ini terjadi karena sistem pendidikan yang masih *top down* atau satu arah, fungsi pengawasan pemerintah tidak berjalan, lemahnya Manajemen Berbasis Sekolah, guru yang lalai dan tidak profesional hingga peserta didik atau anak-anak yang belum menyadari pentingnya pendidikan.

Sistem pendidikan dari pusat yang *top down* dan kurang memberi tempat pada Pendidikan Berbasis Masyarakat, yaitu suatu penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Hal ini terlihat dari polemik tentang Ujian Nasional (UN). Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy misalnya, mewacanakan moratorium atau penghapusan sementara UN. Ia mengungkapkan delapan alasan yang melatari wacana tersebut. *Pertama*, menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung Nomor 2596 K/PDT/2008 tanggal 14 September 2008. Maka UN perlu

dimoratorium hingga sarana prasarana sekolah merata di seluruh Indonesia. *Kedua*, sesuai dengan nawacita untuk melakukan evaluasi terhadap model penyeragaman dalam sistem pendidikan nasional. *Ketiga*, Moratorium UN juga menghindari siswa putus sekolah. *Keempat*, hasil UN sampai saat ini belum dapat menjadi instrumen peningkatan mutu pendidikan di Indonesia karena kurang mendorong siswa secara utuh. *Kelima*, cakupan UN yang luas, menyulitkan hasil UN yang kredibel dan bebas dari kecurangan. Padahal sumber daya yang dikerahkan cukup besar. *Keenam*, UN dianggap tak berimplikasi sama dan secara langsung terhadap setiap peserta UN. *Ketujuh*, UN belum menjadi alat pemetaan yang tepat. *Kedelapan*, UN dinilai cenderung membawa proses belajar ke orientasi yang salah karena UN hanya menguji ranah kognitif dan beberapa pelajaran tertentu saja. Bahkan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mendesak pemerintah sepenuhnya menghapus ujian nasional (UN). Sayangnya presiden Jokowi malah memutuskan Ujian Nasional tetap akan dijalankan dengan berbagai penyempurnaan dan perbaikan. Perbaikan diantaranya peningkatan kompetensi guru yang telah disertifikasi dari waktu ke waktu, sehingga akan ada evaluasi terkait kinerja guru. Penyempurnaan juga dilakukan dalam hal ujian sekolah yang nantinya akan ada kisi-kisi nasional.

Lalu mengenai lemahnya Manajemen Berbasis Sekolah ditandai oleh begitu banyaknya peristiwa yang mengganggu jalannya kegiatan belajar mengajar di sekolah, antara lain masih banyaknya sekolah yang belum terakreditasi, guru-guru yang mogok mengajar sebagai

bentuk protes terhadap kepala sekolah dan bendahara yang dinilai tidak transparan dalam mengelola dana sekolah, gaji guru honor yang belum dibayar, maupun banyaknya guru yang tidak berada di tempat tugas terutama di kampung-kampung. Bupati Memberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak, misalnya, mengeluhkan betapa sulitnya mencari guru untuk mengajar di kabupatennya. Menurutnya, banyak guru yang sudah ditempatkan dan diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) tetapi lebih banyak tinggal di kota dan melalaikan proses belajar mengajar di sekolahnya, dan ironisnya para guru ini tetap menerima gaji bulanan. Hal ini menyebabkan pendidikan di daerah pegunungan Papua seperti Memberamo Tengah kualitasnya sangat menurun.

Keluhan akan guru yang lalai dan tidak profesional pun masih menjamur di seantero provinsi. Lalai karena tidak berada di tempat tugas. Tidak profesional karena tidak mampu menjadi seorang guru dengan segala kualifikasi dan kompetensinya. Hal ini dikemukakan oleh Wakil Bupati Asmat, Thomas Safanpo, dalam pelatihan Manajemen Berbasis Sekolah di Kabupaten Asmat beberapa waktu lalu. “Banyak guru yang tidak melaksanakan tugasnya. Kalaupun ada guru bantu, kualifikasinya hanya tamatan SMA. Banyak guru Si tapi kompetensinya rendah. Contoh guru-guru PNS kita mengajar anak kelas satu sampai kelas tiga tetapi anak-anak belum bisa membaca, menulis dan berhitung. Sebaliknya guru-guru Sarjana Mengajar Terdepan, Terluar dan Tertinggal (SM3T) baru tiga sampai empat bulan mengajar sudah bisa membuat anak-anak bisa menguasai tiga kompetensi dasar.”

Hal lain yang memperburuk kondisi pendidikan di Papua adalah pemerintah tidak menjalankan pengawasan dengan baik. Pemerintah dan DPR Papua mempertanyakan sikap tenaga pengajar, khususnya guru-guru yang bertugas di daerah pedalaman, namun hal itu tidak cukup. Pemerintah harus membangun dialog dan mencari solusi terhadap persoalan tenaga pengajar tersebut.

Lemahnya fungsi pengawasan pemerintah, khususnya pemerintah provinsi, kota dan kabupaten berdampak negatif bagi dunia pendidikan di Papua. Padahal, pemerintah adalah pengawas utama proses pendidikan. Pemerintah telah lalai mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 10 yaitu *Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Akibatnya, pemerintah tidak memberikan layanan dan menyelenggarakan pendidikan yang bermutu di Tanah Papua sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 11 ayat 1, yang berbunyi: *Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.*

Dari situasi yang buruk itu ada beberapa kabupaten telah menunjukkan sikap yang jelas dan positif, seperti yang terjadi di kabupaten Merauke dan Keerom. Pemerintah kabupaten Merauke dengan sikap tegas memberikan

sanksi kepada guru-guru yang tidak menjalankan tugas mengajarnya, yaitu dengan tidak membayarkan insentif kepada guru-guru tersebut. Pemerintah kabupaten Keerom mengambil kebijakan menahan gaji para guru yang tidak melaksanakan tugas mengajar di sekolah-sekolah daerah tugasnya.

Sikap tegas yang dilakukan oleh pemerintah di Merauke dan Keerom tersebut setidaknya dapat memberikan efek jera kepada guru-guru, sebagian besar PNS, yang melalaikan tugas mengajar di sekolah. Hal ini juga memberikan keadilan bagi sebagian besar guru kontrak atau honorer untuk dihargai secara pantas. Pemerintah harus memberikan perhatian para guru kontrak atau honorer yang menjalankan tugas mengajarnya dengan tertib dan setia mengajar di sekolah-sekolahnya. Pemerintah sebaiknya mengapresiasi guru-guru yang menjalankan tugas mengajarnya secara profesional dan mau mengabdikan kepada sekolahnya.

### **Solusi bagi Pendidikan di Papua**

Bagi Tanah Papua, pendidikan menjadi elemen dasar yang terus diperjuangkan untuk membebaskan masyarakat dari kebodohan, ketertinggalan, keterbelakangan, dan perkembangan intelektual orang-orang Papua yang terabaikan. Pendidikan melahirkan generasi Papua yang penuh harapan. Maka, beragam persoalan dunia pendidikan harus diselesaikan. Berbagai elemen, khususnya, penyelenggara pendidikan harus berada di garis depan untuk mengubah dan memperbaiki wajah pendidikan saat ini.

Berikut ini sejumlah catatan yang bisa memberikan jalan keluar untuk mengubah wajah pendidikan Papua yang gelap menjadi terang. Pertama, menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah ke seluruh institusi pendidikan di Tanah Papua. Hal ini untuk menjamin dan meningkatkan pendidikan yang bermutu, seperti yang tertera dalam Pasal 51 ayat 1, UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan: *Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah*. Dengan prinsip MBS, tugas dan fungsi pengawasan pemerintah dalam bidang pendidikan akan sangat dibantu. Hal ini mengingatkan bahwa lembaga pemerintah tidak selalu berada di sekolah.

Dengan kata lain, MBS membantu menciptakan budaya dan lingkungan sekolah yang kondusif untuk pembentukan karakter dengan melibatkan peran serta orang tua dan masyarakat. Dengan adanya sinergi antara pihak Sekolah (Kepsek dan guru), Komite Sekolah (orang tua murid) dengan dukungan pemerintah (Kampung, Distrik, Kabupaten) melalui komunikasi efektif dan manajemen yang dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif dan responsif, proses pendidikan akan lebih terkawal. Ada banyak contoh penerapan MBS yang berhasil, salah satunya di SD YPK Tablasupa Kabupaten Jayapura, dan yang dekat pusat kota itu, SDN Abeale Sentani.

Kedua, menerapkan pendidikan berpola asrama. Pendidikan berpola asrama telah memberikan bukti banyak melahirkan generasi muda Papua yang cerdas, kritis, mandiri dan berdedikasi tinggi bagi pembangunan

di Papua. Pola pendidikan asrama ini pernah dituangkan dalam Kesepakatan Timika (2007), yaitu sebuah kesepakatan kerja sama antara gereja dan pemerintah secara sinergis untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu sekolah dan asrama di Papua. Sayangnya sejak kesepakatan tersebut dibuat pada tahun 2007 hingga 2017, nasib sekolah berpola asrama seperti lazimnya sebuah kesepakatan, kehilangan semangat dan tanpa *action plan*. Memang ada banyak asrama mahasiswa-maupun mahasiswi yang dibangun namun hanya sekedar sebagai tempat penampungan tanpa pendidikan karakter di dalamnya, sehingga kurang memberikan dampak perbaikan mutu para pelajar atau mahasiswa tersebut.

•••

Perubahan dan perbaikan pendidikan di Tanah Papua sudah tidak bisa diabaikan lagi. Buruknya pendidikan akan menurunkan kualitas hidup orang-orang Papua. Pendidikan, salah satu sektor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada 2010-2015 IPM Provinsi Papua nilai sebesar 57,25 dan Papua Barat nilainya 61,73. Lalu tahun 2016 IPM provinsi Papua nilainya 58,05, dan masuk dalam kategori provinsi yang nilai IPM rendah. Selain pendidikan, IPM ini juga terkait dengan pelayanan kesehatan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Belajarlah dari sejarah bangsa-bangsa, bahwa pendidikan menjadi hal utama dalam membangun kualitas kehidupan dan mutu masyarakat. Bangsa yang maju dan berkualitas selalu memprioritaskan pendidikan.

Pemerintah, baik di pusat, provinsi, kabupaten, harus belajar kepada sejarah bangsa lain, bahwa pendidikan menjadi pijakan utama bagi pembangunan masyarakat. Para penyelenggara pendidikan itu sudah semestinya menggunakan hati, pikiran, dengan aksi nyata mewujudkan pendidikan yang bermutu bagi semua orang, tak terkecuali di pedalaman Papua.

---

Bagi Tanah Papua, pendidikan menjadi elemen dasar yang terus diperjuangkan untuk membebaskan masyarakat dari kebodohan, ketertinggalan, keterbelakangan, dan perkembangan intelektual orang-orang Papua yang terabaikan.

Pendidikan melahirkan generasi Papua yang penuh harapan. Maka, beragam persoalan dunia pendidikan harus diselesaikan. Berbagai elemen, khususnya, penyelenggara pendidikan harus berada di garis depan untuk mengubah dan memperbaiki wajah pendidikan saat ini.

# — 10

## Papua dan Kekuasaan

*Kuberjalan  
Dalam hutan yang mistis  
Ada emas di bawah sagu  
Cenderawasih pada dahan gaharu  
Mata melotot, langkah makin cepat  
Di atas kepala Homo Melanesia  
Biara Sang Surya, 1 Mei 2010*

### **Manusia Penguasa**

Sebagaimana dijabarkan oleh Nietzsche, kehendak untuk berkuasa (*the will to power*) adalah ibu dari manusia penguasa. Menurutnya, kehendak untuk berkuasa adalah hal yang alamiah bagi manusia, karena ia hidup. Dan hidup itu sendiri adalah kehendak untuk berkuasa. Artinya kehendak untuk berkuasa secara hakiki berarti merebut, melukai, menundukkan, memakai kekerasan, menindas maupun mengeksploitasi –tanpa batas. Jika kehendak untuk berkuasa dijadikan prinsip dalam hidup bersama maka yang menjamur adalah penyangkalan terhadap nilai-

nilai kehidupan, moral, pluralitas, kesetaraan maupun solidaritas (Magnis-Suseno, 1997:225). Dengan demikian adalah fakta tak terbantahkan bahwa ikhtiar (manusia) penguasa dalam hidup bernegara adalah kepentingan untuk berkuasa dan melanggengkan kekuasaan.

Manusia penguasa – yang lahir dari kehendak untuk berkuasa ala Nietzsche – dianggap sebagai hal yang berbahaya oleh filsuf Yahudi kelahiran Hannover-Jerman, Hannah Arendt (1906-1975). Menurut Arendt, kekuasaan bukanlah tanpa batas. Batasnya ialah keberadaan yang lain (Arendt, 1954:201), yang berkorelasi dengan pluralitas-keberagaman-kemajemukan, menjadi titik awal dan akhir bagi langgengnya kekuasaan, “*...because human power correspondents to the condition of plurality to begin with.*”

Lewat konsepnya akan kekuasaan ini, Arendt melihat manusia sebagai makhluk dialogis yang berpartisipasi dalam hidup bersama (bernegara) demi kepentingan bersama. Asumsi Arendt akan manusia dialogis dibangun di atas reformulasi pemahaman akan aktifitas manusia berupa kerja (*work*), karya (*labour*) dan tindakan (*action*) sebagai kritik atas totalitarianisme Hitler dan Stalin. Kerja lebih berkaitan dengan aktifitas manusia *ke dalam* untuk memenuhi aspek biologisnya. Kemutlakan kerja ialah karena manusia memang harus bekerja untuk memperoleh makanan bagi kelangsungan hidupnya. Dalam kerangka berpikir yang demikian, manusia sebagai makhluk pekerja disebut Arendt sebagai *animal laborans*, yang konsentrasinya ialah tubuh dengan kebutuhan biologisnya. Sementara melalui karya, yang bersifat keluar, manusia menata dan mengelola alam agar berguna bagi manusia. Hal ini membuat hidup itu

bernilai bagi manusia. Akhirnya, melalui tindakan manusia memulai sesuatu yang baru, yang berlangsung di antara manusia, termasuk di dalamnya untuk bekerja dan berkarya (Arendt, 1958:7).

Pokok yang terakhir, tindakan, karena berlangsung di antara manusia, demikian Arendt, memupuk kesadaran individu akan keunikan dan kekhasannya seraya menebalkan kesadaran akan keberagaman (pluralitas). Dalam konteks inilah, ikhtiar akan manusia dialogis dikedepankan dalam menekan arogansi manusia penguasa. Lewat tindakan, yang dalam arti ini tindakan komunikatif, kepentingan individu dinomorduakan demi kepentingan bersama. Jika tidak, yang muncul justru pemenuhan kondisi kerja-karya yakni kehidupan (*life*) dan keberadaan di dunia (*worldliness*). Pemenuhan kondisi kerja-karya inilah yang, menurut Arendt, merupakan embrio bagi lahirnya manusia penguasa. *“As living beings, concerned with the preservation of life, men are confronted with and driven by necessity. Necessity must be mastered before the political ‘good life’ can begin and it can be mastered only through domination”* (Arendt, 1954:116). Bahkan, kekuasaan mengontrol sumber-sumber kehidupan itu dilakukan dengan cara melegalkan perlakuan kekerasan terhadap yang lain, entah individu, kelompok bahkan bangsa.

### **Salah Kaprah Kekuasaan**

Kekhawatiran Arendt akan manusia penguasa di atas, yang lahir dari pengalamannya hidup di bawah rezim totaliter Nazi Jerman, sepertinya masih berlangsung

hingga saat ini. Egoisme manusia sebagai penguasa, yang melahirkan tindakan apolitik, telah mencengkeram kebebasan, mencederai pluralitas dan mengabaikan solidaritas.

Tindakan apolitik yang mencengkeram kebebasan hadir dalam bentuk pelanggaran HAM. Beberapa kasus terjadi tanpa adanya penyelesaian hukum yang jelas dan transparan. Kisah tewasnya aktivis hak asasi manusia Munir karena diracun di dalam pesawat dalam perjalanan Jakarta-Belanda adalah bisa menjadi contoh.

Tindakan apolitik yang menciderai pluralitas menyeruak lewat aksi anarkis bernuansa SARA. Seperti dicatat oleh *Center for Religious and Cross Cultural Studies UGM* (Bagir, 2011: 26-54) dalam *Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia 2011*, kita menyaksikan kekerasan yang berulang terhadap minoritas Ahmadiyah di Cekuesik, diskriminasi pemerintah Bogor terhadap jemaat gereja GKI Yasmin, hingga pembakaran rumah dan pesantren di Kabupaten Sampang, Madura.

Tindakan apolitik yang mengabaikan solidaritas dipertontonkan para wakil rakyat sendiri. Ketika sebagian besar rakyat Indonesia masih terbelenggu oleh kemiskinan, korupsi merajalela. Mulai dari kasus Gayus Tambunan hingga Kasus Suap Wisma Atlet, ratusan miliar uang rakyat dimanipulasi untuk kekayaan sendiri dan sekelompok orang. Kasus-kasus korupsi lain hingga kini terus berkembang.

Kekhawatiran yang sama pun menyeruak di Papua. Situasi sipil-politik maupun ekonomi, sosial, budaya serta pertahanan dan keamanan tampak bergelombang, berputar-putar- tanpa adanya penyelesaian yang

memuaskan semua pihak. Dalam laporan Fransiscan Internasional berkaitan dengan *Human Rights in Papua 2010/2011*, kekerasan oleh militer masih terjadi seiring sikap represif terhadap kebebasan untuk berekspresi. Sesudah Freeport mengeksploitasi tambang emas terus berkembang eksploitasi sumber daya alam Papua lainnya, mulai dari kelapa sawit hingga MIFFE.

Situasi terkini, dalam bidang sipil-politik misalnya, wacana dialog Jakarta-Papua, walaupun sudah sampai pada tahap penentuan dan pembentukan tim juru runding, di samping belum rampungnya identifikasi akan apa dan siapa yang dimaksudkan dengan Papua, dinilai oleh sebagian pihak kehilangan gemanya karena bertele-tele. Belum lagi, kepentingan Pemerintah Pusat yang angin-anginan dalam wacana ini.

Wacana dialog tampak semakin tenggelam karena geliat pesta demokrasi pemilukada provinsi Papua cenderung menguatkan isu “politik identitas” yang memecah belah ‘satu hati demi Papua tanah damai lewat dialog’ yakni Papua pesisir versus Papua pegunungan dan Papua versus Pendatang. Walaupun isu ini pertama-tama diangkat untuk menjaring suara.

Sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga Joko Widodo atau Jokowi tidak memberikan respon positif terhadap upaya penyelesaian persoalan politik Papua melalui jalan dialog antara Papua-Jakarta. Belakangan Jokowi sedikit memberi celah suara dialog hingga ke istana, namun belum memberi titik terang untuk diadakan dialog yang melibatkan para pihak di Papua dan Jakarta dalam menyelesaikan persoalan konflik dan tuntutan penentuan nasib sendiri di Papua.

Kekuasaan di Jakarta masih sulit menjangkau rakyat Papua. Pemerintah di Jakarta belum membuka pintu bagaimana kekuasaan bisa dibicarakan, dinegosiasikan, dibicarakan bersama dalam satu meja. Tembok kekuasaan itu masih tebal.

•••

Kuasa atas Tanah Papua masih diselimuti kabut tebal. Kesetaraan berbicara tentang keadilan dan aspirasi sebagai warga negara tidak atau belum mendapatkan penghormatan dan penghargaan. Sekian lama rakyat Papua menantikan sikap penghormatan dari negara. Harapan itu menjauh. Sejatinya, kekuasaan itu bermakna sebagai sarana melindungi rakyat, membangun perdamaian.

---

Kekuasaan di Jakarta masih sulit menjangkau rakyat Papua. Pemerintah di Jakarta belum membuka pintu bagaimana kekuasaan bisa dibicarakan, dinegosiasikan, dibicarakan bersama dalam satu meja. Tembok kekuasaan itu masih tebal.



## — II

# Turisme dan Kearifan Ekologis

AKHIR-akhir ini isu-isu Papua yang sering diperbincangkan tentang gejolak sosial politik dan ekonomi. Perdebatan tentang kepemilikan saham dan perpanjangan kontrak karya tambang emas Freeport, tentang Joko Widodo yang berkunjung ke Papua dengan membawa proyek infrastruktur, dan soal polemik NKRI dan penentuan nasib sendiri, dan tanggung jawab negara atas pelanggaran hak asasi manusia di Papua. Hal-hal seperti dunia pariwisata tidaklah seksi dipandang dan diperhatikan, seolah tak mempengaruhi kehidupan orang Papua. Padahal, pariwisata terkait erat dengan ekologi, lingkungan dan budaya orang Papua itu sendiri. Maka dunia

wisata dan pembangunan bagi orang Papua selayaknya mendapatkan ruang dalam kebijakan pemerintah dan masyarakat dalam menghargai dan merawat kehidupan orang Papua lebih baik lagi.

•••

Pariwisata atau turisme yang selalu dekat dengan unsur rekreasi, tidak terlepas dari aspek ekonomi. Itu sebabnya dalam arti yang lebih lengkap pariwisata terkait erat dengan industri jasa mulai dari transportasi, tempat tinggal atau penginapan, makanan, minuman, tetapi juga budaya dengan semangat pertualangan untuk menikmati pengalaman yang baru dan berbeda.

Wikipedia mencatat pariwisata sebagai sektor ekonomi penting di Indonesia. Pada tahun 2009, pariwisata menempati urutan ketiga dalam hal penerimaan devisa setelah komoditi minyak dan gas bumi serta minyak kelapa sawit. Lalu jumlahnya berkembang, berdasarkan data tahun 2016, jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia sebesar 11.525.936 juta lebih atau tumbuh sebesar 10,79% dibandingkan tahun 2015.

Kekayaan alam dan budaya merupakan komponen penting dalam pariwisata di Indonesia. Alam Indonesia memiliki kombinasi iklim tropis, 17.508 pulau, yang 6.000 di antaranya pulau kosong tanpa penghuni serta garis pantai terpanjang di dunia setelah Kanada dan Uni Eropa. Wisata alam seperti taman nasional di Sumatera, Bunaken, pantai-pantai di Bali, Gunung Rinjani Lombok, didukung dengan warisan budaya yang kaya yang mencerminkan

sejarah dan keberagaman etnis seperti Candi Prambanan dan Borobudur, Budaya Toraja, DI Yogyakarta maupun di Minangkabau. Belum lagi 7 lokasi tujuan wisata di Indonesia yang telah ditetapkan oleh Unesco dalam daftar situs warisan dunia.

### **Pariwisata di Asmat-Papua**

Badan Pusat Statistik menyebut sebelas provinsi yang paling sering dikunjungi oleh para wisatawan yakni Bali, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Utara, Lampung, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Banten dan Sumatera Barat. 59% dari para wisatawan tersebut mempunyai tujuan untuk liburan, sementara 38% lainnya untuk tujuan bisnis.

Papua tidak disebut. Namun dari segi objek wisata, nama Raja Ampat disebut berulang kali. Raja Ampat adalah objek wisata dengan taman laut terbesar di Indonesia yang memiliki beraneka ragam biota laut dan lokasi selam scuba terbaik karena jarak pandang mencapai 30 meter pada siang hari dengan 1.300 spesies ikan, 600 jenis terumbu karang, dan 700 jenis kerang. Begitu juga nama Taman Nasional Lorentz yang memiliki sekitar 42 spesies mamalia langka seperti kangguru pohon, landak irian, tikus air, walabi dan kuskus dengan 1.000 spesies ikan, di antaranya ikan koloso. Di taman ini juga terdapat salju abadi yang berada di puncak Gunung Jayawijaya.

Papua saja tidak disebut apalagi (kabupaten) Asmat. Namun hal ini tidak lalu berarti Asmat miskin objek dan potensi pariwisata. Objek wisata Asmat mencakup wisata

budaya dan wisata alam. Wisata budaya mempunyai daya tarik terbesar karena berkaitan dengan pola hidup masyarakat yang masih alami, berburu dan meramu dan terutama kemampuan ukir dengan nilai seni yang tinggi. Tentang seni ukir Asmat ini, dunia jadi saksi. Belum lagi tarian tradisional beserta pesta-pesta adatnya. Di samping wisata budaya, ada pula wisata alam berlumpur. Wisata lumpur karena topografi tanah di Asmat ialah dataran rendah tepat pada garis pantai nyaris tenggelam pada permukaan laut yang dikelilingi oleh hutan luas membentang dengan ribuan anak sungai yang saling memotong sebagai sarana transportasi. Topografi yang demikian pun menghasilkan daya cipta berupa rumah panggung dengan bahan dasar kayu yang dihubungkan oleh jembatan kayu yang panjang. Itu sebabnya Asmat disebut Kota Lumpur atau Kota Seribu Papan.

### **Kearifan Wisata Lumpur**

Undang-undang No.10/2009 tentang kepariwisataan, mendefinisikan pariwisata sebagai macam macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Bukan tanpa sebab penyedia layanan disebut secara hirarkis mulai dari masyarakat, pengusaha, lalu pemerintah. Godfrey (2000) misalnya, menegaskan bahwa “*comunities is a basic elemen of modern tourism.*” Masyarakat menjadi elemen terpenting dalam pengembangan pariwisata karena salah satu tujuan utama wisatawan ialah melihat kehidupan masyarakat lokal

beserta kearifan budaya dan adat istiadat yang dianutnya. Dengan demikian, jika masyarakat menjadi pelaku utama pariwisata yang *multidimensional, multifaceted activity, which touches many lives and many different economy activities* (Chris Cooper, 1993:3), masyarakat jugalah yang mesti menjadi penerima manfaat terbesar bisnis rekreasi wisata.

Dalam kaitan dengan itu, pengembangan pariwisata menjadimatemakologis. Dalam prinsip ekologi, pembangunan apapun termasuk di dalamnya pengembangan pariwisata “... *bila tidak disertai dengan perkembangan sosial dan moral yang otentik, akhirnya akan berbalik melawan manusia*”. Perkembangan sosial dan moral yang otentik bermuara pada perkembangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai pemilik objek wisata itu sendiri. Prinsip ekologi dalam bidang pariwisata ini penting karena tidak memisahkan masyarakat dari lingkungannya sekaligus mengembangkan pariwisata yang berdasar pada kearifan lokal.

Dalam konteks Asmat (dan Papua), pembangunan – lewat bidang pariwisata – tidak memisahkan manusia dari lumpur tempatnya lahir, hidup dan kembali. Secara ekologis tidak memisahkan manusia dari “*ikatan antara kepedulian terhadap alam, keadilan bagi kaum miskin, komitmen kepada masyarakat, dan kedamaian batin*”.

- *Peduli pada alam* karena bagi orang Asmat (dan Papua), alam adalah ibu, saudara dan saudari. Mereka hidup dari alam sehingga alam tidak hanya bernilai ekonomis tapi juga mistis religius.

- *Bersikap adil terhadap kaum miskin* karena kaum miskin ( dalam konteks Asmat ialah kaum lansia, janda, orang sakit dan anak-anak) selalu mendapat tempat pertama dalam pembagian hasil meramu atau hasil buruan.
- *Berkomitmen pada masyarakat* karena nilai *kebersamaan* atau *komunitas* amat dijunjung tinggi. Mulai dari perencanaan yang dibicarakan bersama di para-para pinang atau di Jew (Asmat) hingga pembagian hasil kerja.
- *Kedamaian batin* karena ikatan-ikatan dengan alam dan sesama (terutama kaum miskin) yang terawat menjaga relasi dengan roh leluhur dan roh nenek moyang. Keyakinan akan kedamaian batin yang berelasi erat dengan dunia roh (*ow capinmi*, *dampu ow capinmi*, dan *safar*) termuat dalam ukiran-ukiran Asmat hasil karya para pengukir (*Wow Ipits*).

Pengembangan pariwisata yang demikian itu merupakan “bentuk pembangunan berkelanjutan dan integral” untuk melawan “sebab-sebab struktural dari salah-langkah ekonomi dunia dan mengoreksi model pertumbuhan yang tidak mampu menjamin penghormatan terhadap lingkungan (dan karenanya manusia di dalamnya)”.

Akhirnya peran pemerintah untuk mendorong hal ini sekaligus memproteksinya amatlah krusial. Tanpa peran pemerintah, pariwisata akan terjerumus pada bisnis semata-mata dengan pengusaha sebagai pelaku utama dan masyarakat (yang punya wisata budaya dan alam) sebagai objek semata-mata. Jika sudah demikian, ihktiar

memajukan kesejahteraan umum dari pinggir Indonesia, lagi-lagi hanya omong kosong. *Tong* di Papua bilang; “*dong baku tipu saja oo...*”

•••

Pembangunan pariwisata berbasis ekologi akan menyelamatkan orang-orang Papua. Turisme ekologis itu menempatkan orang-orang Papua sebagai pelaku utama dan penerima manfaat yang lebih besar, bukan menjadi objek wisata dan bagian masyarakat yang terpinggirkan. Sudah banyak cerita kemiskinan orang-orang Papua di sekitar ‘surganya Papua’, seperti Raja Ampat atau daerah-daerah indah lain di Tanah Papua. Papua punya banyak cerita pilu tentang kemiskinan dan penderitaan itu. Maka, mari belajar dari kearifan ekologis, seperti wisata lumpur Asmat. *Dormom....*

---

Pembangunan pariwisata berbasis ekologi akan menyelamatkan orang-orang Papua. Turisme ekologis itu menempatkan orang-orang Papua sebagai pelaku utama dan penerima manfaat yang lebih besar, bukan menjadi objek wisata dan bagian masyarakat yang terpinggirkan. Sudah banyak cerita kemiskinan orang-orang Papua di sekitar 'surganya Papua', seperti Raja Ampat atau daerah-daerah indah lain di Tanah Papua. Papua punya banyak cerita pilu tentang kemiskinan dan penderitaan itu. Maka, mari belajar dari kearifan ekologis, seperti wisata lumpur Asmat.

## — 12

# Miskin di Tanah Kaya

MENGAPA orang Papua miskin? Pertanyaan ini ironis. Perut bumi Papua mengandung kekayaan alam melimpah, dari emas, tembaga, dan hutan, namun orang-orang Papua didera kemiskinan.

Di Tanah Papua, orang bisa memanen dan menuai hasilnya tanpa menanam, karena alam telah menyediakannya. Itulah suku-suku bangsa Papua yang hidup, baik sebagai peramu maupun petani. Mereka tak berkekurangan. Namun, mengapa saat ini mereka menjadi miskin dan berkekurangan?

...

Antropolog Belanda Jan Boellars, meninggal 2004, dalam bukunya, *Manusia Irian: Dahulu, Sekarang, Masa Depan*, membagi manusia Irian Jaya – kini Papua, berdasarkan mentalitasnya, dalam dua tipe yakni Kaum Peramu dan Kaum Petani. Kaum peramu meliputi Suku Marind-Anim, Suku Yah'ray dan Suku Asmat. Sementara kaum petani meliputi Suku Mandobo, Suku Ekagi, Suku Dani, dan Suku Ayfat.

Kaum peramu mempunyai ciri-ciri konsumtif, mandiri, improvisatif-kreatif, egaliter dalam relasi sosial, hidup dari kelimpahan alam sekaligus tunduk di hadapan kedahsyatan alam. Kaum petani mempunyai ciri-ciri produktif dan pekerja keras, mandiri, menetap dan komunal.

Orang Papua, baik itu kaum peramu maupun petani adalah tidaklah miskin. Segala kebutuhan kaum peramu telah disediakan oleh alam. Sagu, ikan, sayur-sayuran, buah-buahan, daging, air minum dan lain sebagainya. Mereka tinggal mengambilnya di hutan. Itupun dengan filosofi makan (hidup) hanya untuk hari ini sehingga makanan di hutan tidak akan pernah habis karena konsumsi yang berlebihan.

Begitu juga dengan kelompok petani yang di satu sisi pekerja keras, di sisi lain dimanjakan oleh alam yang kaya. Tanpa bekerja saja mereka sudah berkelimpahan, apalagi lagi kalau disertai kerja keras.

Jangan heran jika pendidikan kurang diminati karena apa gunanya sekolah jika sekolah hanya supaya bisa mendapat gaji dan uang. Tanpa uang, mereka bisa hidup. Bahkan hidup dalam kelimpahan.

Bertolak dari kenyataan tersebut serta pengetahuan sederhana akan antropologi Papua sebagaimana dijabarkan oleh Jan Boelaars di atas seyogianya dapat menjadi pegangan pemerintah dalam membuat kebijakan di Papua. Kebijakan yang berpihak pada orang Papua. Jika tidak, jangan-jangan antropologi Papua, terutama 'titik-titik lemah' ciri-ciri masyarakat peramu dan petani Papua, malah dimanfaatkan sebagai senjata untuk merusak dan mengeksploitasi manusia Papua? Jika demikian halnya, jangan heran jika muncul kesan situasi yang terjadi di Papua saat ini bukanlah kemiskinan melainkan pemiskinan terhadap orang Papua.

Kemiskinan adalah ketiadaan aset-aset dan kesempatan esensial yang menjadi hak setiap manusia. Namun karena terlalu luasnya definisi tentang kemiskinan, ia lalu diukur dengan pemenuhan pendidikan dasar, perawatan kesehatan, ketersediaan air bersih dan sanitasi serta pendapatan masyarakat. Sementara pemiskinan adalah membuat jadi miskin (Bank Pembangunan Asia, Oktober 1999). Menurut definisi ini, sebagian besar orang Papua masuk dalam kategori miskin. Pada 2016 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua berada di peringkat paling rendah di seluruh wilayah Indonesia skornya 58,05.

Apa yang terjadi sesungguhnya? Bagaimana orang Papua yang tanah dan alam dilimpahi kekayaan menjadi penduduk miskin? Atau, yang terjadi adalah pemiskinan terhadap orang Papua?

Pemiskinan itu terjadi melalui praktik-praktik bisnis sumber daya alam yang tidak pro-Papua. Praktik pembalakan liar hutan atau (illegal logging) telah merusak sumber-sumber ekonomi penduduk Papua. Pembabatan

hutan untuk perkebunan sawit juga telah merusak sumber-sumber kehidupan bagi orang Papua.

Praktik-praktik negatif itu telah menyingkirkan keberadaan orang Papua, terusir dari akar budaya dan tempat tinggalnya, dan menanggung derita panjang dan turun-temurun karena tak lagi memiliki tanah dan hutan.

Bahkan saat ini, orang-orang Papua terdesak karena keberadaan pendatang baik dari program transmigrasi maupun inisiatif individu atau kelompok yang merantau ke Papua. Roda perekonomian sebagian besar bukan digerakkan oleh pengusaha dan orang-orang Papua. Para pendatang kini mulai menjadi mayoritas di Papua. Menurut Neles Tebay (2009) dua pertiga penduduk di kota-kota besar di Papua Barat merupakan pendatang. Dan, warga Papua menjadi terasing di tanahnya sendiri.

Pemiskinan terhadap orang-orang Papua telah berjalan beberapa dekade sejak Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada 1969. Referendum berjalan tanpa proses satu orang satu suara (*one man one vote*) itu memaksa Papua berada di pihak Indonesia. Dua tahun sebelum Pepera, gunung emas di Tanah Amungsa itu pun telah diambil Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Soeharto.

Pemiskinan Papua adalah bagian upaya menempatkan orang Papua menjadi tertindas dan tak berdaya di tengah kekayaan negerinya. Sekian dekade, bangsa Papua melewati kegelapan; pendidikan dan kesehatan yang buruk, kebudayaan dan identitasnya dihancurkan, kebebasan berpendirian dan berekspresi dkekang.

Seberapa pun dana untuk membangun Papua tanpa membebaskan diri orang Papua dari pemiskinan itu, Papua

tidak akan memiliki masa depan yang baik. Martabat orang Papua terangkat saat terbebas dari praktik-praktik pemiskinan itu.

---

Pemiskinan Papua adalah bagian upaya menempatkan orang Papua menjadi tertindas dan tak berdaya di tengah kekayaan negerinya. Sekian dekade, bangsa Papua melewati kegelapan; pendidikan dan kesehatan yang buruk, kebudayaan dan identitasnya dihancurkan, kebebasan berpendirian dan berekspresi dikekang.

# Epilog

NUN JAUH di lembah gunung, mulai dari Banti hingga Tipuka, dari Ayuka sampai ke Otakwa-Manasari di Mimika Timur Jauh, ada banyak orang Amungme dan Kamoro yang terkena dampak limbah tambang emas Freeport. Sungai-sungai yang dangkal akibat lumpur dan talling, pohon-pohon sagu dan tanaman obat yang mati, ikan yang tercemar, spesies-spesies terlindungi yang terancam punah hingga sumber-sumber kehidupan lainnya yang hilang dan musnah.

Kisah Tembagapura dan Manasari adalah cerita miris nan kontras. Kisah penambangan emas selama beberapa dekade itu berujung pada kerusakan alam yang hebat dan merusak sumber-sumber air, bahkan kejahatan kemanusiaan karena kekerasan yang terjadi di areal tambang Freeport.

Tembagapura dan Manasari hanyalah sebagian kisah kejahatan terhadap kemanusiaan lewat perusakan alam di Papua dan Indonesia. Masih banyak cerita perusakan alam yang diyakini akan semakin meningkat di masa-masa mendatang. Sudah seharusnya eksploitasi terhadap

alam yang abai pada prinsip-prinsip ekologi, pelestarian lingkungan, konservasi dan pembangunan, yang membunuh manusia Papua secara perlahan bahkan masif dan sistematis dihentikan.



Eksplorasi alam, seperti di Tembagapura-Manasari, Mimika, sebagian fenomena yang berlangsung sepanjang sejarah Papua, pengerukan kekayaan alam tak sepenuhnya membawa berkah, sebaliknya melahirkan tragedi-tragedi kemanusiaan.

Tak hanya eksploitasi alam dan manusia Papua, kondisi memburuk juga dialami oleh orang-orang asli Papua yang tertindas oleh praktik-praktik diskriminasi, marginalisasi, tersingkir dari tanahnya. Masyarakat Papua semakin terkekang dan terhimpit dalam ruang-ruang kebudayaan, sosial, politik, dan ekonomi.

Setiap tahun terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Kebebasan berekspresi dan berpendapat dalam pengawasan aparat keamanan dan pemerintah. Tak jarang para aktivis berguguran dalam menyuarkan kebebasan secara damai. Tubuh demokrasi telah lama rapuh, karena rezim otoriter masih diterapkan di Papua.

Konflik, ketegangan sosial, baik di akar rumput, antar elit (pemimpin) Papua menjadi persoalan dan mengganggu fokus rakyat Papua dalam memikirkan nasib dan masa depannya. Konflik atas nama etnis antara Papua dengan Non-Papua, atas kelompok wilayah Papua pesisir dengan Papua gunung, telah nyata menghambat perjuangan

mencapai cita-cita dan masa depan Papua, yang damai dan sejahtera.

Tak bisa disangkal, fenomena politik, tentang aspirasi penentuan nasib sendiri memicu suhu politik di Jakarta dan Papua meningkat. Pemerintah Indonesia terus berupaya melakukan diplomasi kepada negara-negara Pasifik Selatan yang mendukung aspirasi rakyat Papua itu. Hal ini untuk membentuk mengalirnya dukungan penentuan nasib Papua atau aspirasi pro-kemerdekaan.

Sementara di dalam masyarakat Papua sendiri, yang terlahir di Tanah Papua, belum memperlihatkan suara solid terhadap penentuan nasib sendiri. Namun, dalam perkembangan saat ini rakyat Papua yang menyuarakan penentuan nasib sendiri semakin menguat.

Jalan menuju perjuangan itu nampak berat. Rakyat Papua terus menghadapi beragam persoalan, seperti ketimpangan ekonomi, kemiskinan, pelayanan publik; kesehatan dan pendidikan yang buruk, perampasan lahan, penguasaan tanah, diskriminasi, dan pengekangan ruang demokrasi dan pelanggaran hak asasi manusia.

Berbagai fenomena itu yang terurai dalam buku ini merupakan pengumpulan penulis memaknai dan mengalami kehidupan bersama masyarakat, di kampung-kampung, baik di pegunungan maupun pesisir. Dengan karakter, budaya, dan semangat kemanusiaan, penulis yakin orang-orang Papua akan meraih cita-cita yang sedang diperjuangkan saat ini.

---

Konflik, ketegangan sosial, baik di akar rumput, antar elit (pemimpin) Papua menjadi persoalan dan mengganggu fokus rakyat Papua dalam memikirkan nasib dan masa depannya. Konflik atas nama etnis antara Papua dengan Non-Papua, atas kelompok wilayah Papua pesisir dengan Papua gunung, telah nyata menghambat perjuangan mencapai cita-cita dan masa depan Papua, yang damai dan sejahtera.

# Daftar Pustaka

Arendt, Hannah. 1954. *Between Past and Future*. New York: Penguin Books

-----, 1958. *Human Condition*. Chicago: University of Chicago Press.

Bagir, Zainal Abidin dkk. 2011. *Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia 2011*. Yogyakarta: Center for Religious and Cross Cultural Studies UGM.

Conoras, Yusman (ed.). 2008. *MRP, Kitong Pu Honai*. Jayapura: Fokes LSM Papua.

Ditjen. Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan. *Alat Kelamin dan Semua Yang Perlu Kita Ketahui Tentang Infeksi Menular Seksual*. Jakarta.

Edwards, Paul (Ed.). 1967. *The Encyclopedia of Philosophy*, vol. 5. London: Collier Macmillan Publishers.

Gunung, I Komang, dkk. 2002. *Buku Pegangan Konselor HIV/AIDS*. Denpasar.

Hernawan, Budi. 2005. *Papua Land of Peace: Addressing Conflict Building Peace in West Papua*. Jayapura: Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Jayapura.

-----, 2008. *The Practice of Torture in Aceh and Papua 1998-2007, with an annex on the situation of human rights in Timor Leste*. Jayapura: Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Jayapura.

Horison. *Majalah Satra*. Edisi Khusus April 2002, Tahun XXXV, No.4/2002, Jakarta: Yayasan Indonesia.

Komisi Penanggulangan AIDS. *Kitorang Pu Cerita*,

*Komik Kesehatan Remaja dan Penanggulangan HIV/AIDS*. Jakarta.

Magnis-Suseno, Franz. 1997. *13 Model Pendekatan Etika*. Yogyakarta: Kanisius.

Moeliono, Laurike. 2005. *Panduan Tentang Pencegahan HIV/AIDS Bagi Orang Tua, Bagaimana Kitorang Bicara Dengan Remaja Tentang HIV/AIDS di Tanah Papua*. Jakarta: PT Optima Adhika.

Mohamad, Goenawan. 2001. *Catatan Pinggir 5*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Muhni, Djuretna A.Imam. 1994. *Moral dan Religi, Menurut Emile Durkheim dan Henri Hergson*. Yogyakarta: Kanisius.

Poerwadarminta, W.J.S. 2002. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Suara Fajar Timur. 2010. *Minuman Keras (MIRAS) Mengancam Kehidupan Orang Papua*. Jayapura: Biro Penelitian Senat Mahasiswa STFT Fajar Timur.

Tebay, Neles. 2008. *Papua: Its Problems and Possibilities for a Peaceful Solution*. Jayapura: Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Jayapura.

----- . 2009. *Membangun Dialog Jakarta-Papua*. Jayapura: Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Jayapura.

----- . 2009. *Upaya Lintas Agama demi Perdamaian di Papua Barat*. Aachen: Lembaga Misi Katolik International Missio.

Wonda, Sendius. 2009. *Jeritan Bangsa, Rakyat Papua Barat Mencari Keadilan*. Yogyakarta: Galang Press.

Yoman, Socratez Sofya. 2005. *Orang Papua Bukan Separatis, Makar dan OPM*. Papua Barat: Lerhamkot.

[www.westpapua.net](http://www.westpapua.net)

# Profil Penulis

ALEXANDRO F. RANGGA OFM adalah Imam Fransiskan yang lahir di Mataloko, Flores pada 13 Juni 1987. Ia ditahbiskan menjadi imam pada 22 April 2018 di APO Jayapura. Menyelesaikan studi S1 pada 2013 dan Pasca Sarjana pada 2016 di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Fajar Timur Abepura-Papua. Buku Fenomena Papua: Esai-esai Sosial ini karya perdananya, menandai sebelas tahun berada di Papua; Wamena, Jayapura raya, Timika, Asmat.